

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(Studi Kasus: Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

U S M A N

NIM. 014707934

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011**



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus : Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pontianak, Juni 2011

Yang Menyatakan,



(USMAN)

Nim. 014707934

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus : Kecamatan Siding Kabupaten Bengkulu)

Penyusun TAPM : Usman

NIM : 014707934

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,



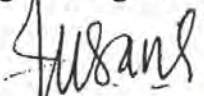
Prof. Dr. Arkanudin, M.Si
NIP. 1911025 198803 1 002

Pembimbing II,



Prof. Dr. Paulina Pannen
NIP.

Ketua Bidang Ilmu /
Program Magister Administrasi Publik,



Dra. Susanti, M.Sc.
.....19671214 199303 2 002
NIP.

Direktur Program Pascasarjana,



Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP. 195202133 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : **Usman**
 NIM : 014707934
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul TAPM : Analisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus : Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka Pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 28 Mei 2011

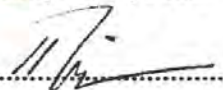
W a k t u : 19.30

Dan telah dinyatakan **LULUS**

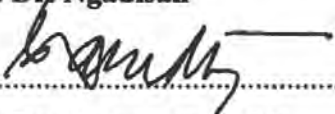
Panitia Penguji TAPM

Katua Komisi Penguji : 

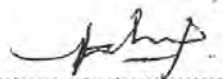
Sucati, M.Sc, Ph.D

Penguji Ahli : 

Prof. Dr. Ngadisah

Pembimbing I : 

Prof. Dr. Arkanudin, M.Si

Pembimbing II : 

Prof. Dr. Paulina Pannen



ABSTRAK

Analisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai
(Studi Kasus : Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang)

U s m a n

Universitas Terbuka

Kata Kunci : Bantuan Langsung Tunai, kompensasi BBM.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas dan dampak implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, identifikasi faktor-faktor pendukung, serta kendala implementasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Siding. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jumlah sampel 30 responden terdiri dari masyarakat penerima program bantuan pemulihan kemiskinan di Kecamatan Siding.

Hasil penelitian menjelaskan implementasi pelaksanaan program bantuan terdiri dari 17 indikator yang sebagian besar mendapat penilaian negatif oleh responden. Selanjutnya, masih banyak aspek yang membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah. Kondisi petugas lapangan yang melakukan ketidakadilan dalam memberikan pelayanan memicu gejolak dan reaksi perlawanan dari masyarakat.

Program BLT ini perlu dikaji kembali secara komprehensif karena banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat (*grassroots*). Banyak dari petugas BPS, kepala desa, ketua RT/RW yang merasa terancam jiwanya dan trauma menghadapi pekerjaan, selanjutnya ada yang ingin meletakkan jabatan. Dampak lainnya adalah mengganggu keamanan kerja, keharmonisan antar sesama warga, dan munculnya kecemburuan sosial.

ABSTRACT

Analysis of Implementation Program of Cash Social Safety Net
(Case study at Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang)

U s m a n

Universitas Terbuka

Keywords : cash social safety net, compensation of BBM

The study was conducted to analyze effectiveness and impact of implementation of Cash Social Safety Net Program (BLT) and to identify the supporting succes factors and constraints as implemented in Kecamatan Siding. The study employed descriptive research design with 30 respondents of BLT receivers.

The results of the study indicated that the implementation of BLT as measured by 17 indicators was perceived negatively by respondents. In addition, there are some aspects which also require further and serious attention from the government. Condition of field officers who do injustice in providing services causing turmoil and resistance from the public reaction

The implementation of BLT must be assessed comprehensively in order to avoid problems at the grassroots level. The data officer from BPS and leaders in community were found threatened, and some even withdrew from their position due to the emerging serious problems during the implementation of BLT. There were also indication of unsafed working environment, disharmony among civilians in the community, and emergence of social jealousy, due to poor implementation of BLT in Kecamatan Siding.



KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih, penulis memanjatkan puji ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dalam memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.

Dalam penulisan ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Arkanudin, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan teknis penulisan ini.
2. Ibu Prof. Dr. Paulina Pannen, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membantu, mengarahkan, mengoreksi dan membimbing penulis sampai dengan selesainya TAPM ini.
3. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta para asisten dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
4. Rekan-rekan mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak yang telah banyak memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian TAPM ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam kelancaran penulisan ini.

6. Keluarga tercinta yang dengan penuh kasih memberikan dukungan moril dan spiritual serta pengorbanan selama perkuliahan.

Semoga segala bantuan yang ikhlas tersebut akan mendapat balasan setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan TAMP ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisannya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat penulis hargai.

Akhirnya semoga TAMP ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Pontianak, Juni 2011

Penulis

UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORETIK	
A. Kajian Teoretik	7
B. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	33
B. Populasi dan Sampel.....	34
C. Instrumen Penelitian	37

D.	Prosedur Pengumpulan Data	42
E.	Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	46
B.	Proses Implementasi Bantuan Langsung Tunai.....	52
C.	Karakteristik Responden.....	60
D.	Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja Implementasi.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
A.	Simpulan.....	105
B.	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA		

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan.....	13
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang.....	31

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan	3
Tabel 2.1	Jumlah Penerima BLT Berdasarkan Desa di Kecamatan Siding..	30
Tabel 3.1	Jumlah Sampel Berdasarkan Desa Di Kecamatan Siding.....	36
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	40
Tabel 3.3	Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	41
Tabel 3.4	Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data.....	44
Tabel 4.1	Batas Dan Luas Daerah Kabupaten Bengkayang Menurut Kecamatan Tahun 2006	47
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin...	48
Tabel 4.3	Perkembangan Pendapatan Regional Dan Angka Perkapita Kabupaten Bengkayang (juta rupiah) tahun 2003-2006.....	49
Tabel 4.4	Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Diverifikasi Tahap II Menurut Kecamatan	50
Tabel 4.5	Prasarana Transportasi Angkutan Darat Di Kabupaten Bengkayang.....	51
Tabel 4.6	Responden Berdasarkan Tingkat Usia	61
Tabel 4.7	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
Tabel 4.8	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	63
Tabel 4.9	Responden Berdasarkan Status Perkawinan	64
Tabel 4.10	Responden Berdasarkan Pekerjaan	65
Tabel 4.11	Responden Berdasarkan Besarnya Penghasilan.....	66
Tabel 4.12	Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan.....	67

Tabel 4.13	Tanggapan Responden Terhadap Visi/Misi dan Informasi ...	68
Tabel 4.14	Tanggapan Responden Terhadap Identifikasi Masyarakat Penerima Bantuan.....	70
Tabel 4.15	Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai	73
Tabel 4.16	Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Petugas Pelaksana Bantuan Langsung Tunai.....	75
Tabel 4.17	Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai	77
Tabel 4.18	Tanggapan Responden Terhadap Perubahan Sikap Setelah Kegiatan Bantuan Langsung Tunai	80
Tabel 4.19	Tanggapan Responden Terhadap Motivasi Kerja Dengan Adanya Bantuan Langsung Tunai	82
Tabel 4.20	Tanggapan Responden Terhadap Perubahan Pendapatan Setelah Kegiatan Bantuan Langsung Tunai	84
Tabel 4.21	Tanggapan Responden Terhadap Penyelewengan Atas Kegiatan Bantuan Langsung Tunai	86
Tabel 4.22	Tanggapan Responden Terhadap Pemerataan dan Keadilan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai	88
Tabel 4.23	Tanggapan Responden Terhadap Dukungan Masyarakat Atas Bantuan Langsung Tunai	91
Tabel 4.24	Tanggapan Responden Terhadap Sarana Transportasi dan Hubungannya Dengan Bantuan Langsung Tunai	93
Tabel 4.25	Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pendidikan dan Hubungannya Dengan Bantuan Langsung Tunai	95
Tabel 4.26	Tanggapan Responden Terhadap Lingkungan Internal/eksternal Hubungannya Dengan Bantuan Langsung Tunai	97
Tabel 4.27	Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Perencanaan Implementasi Bantuan Langsung Tunai.....	99

Tabel 4.28	Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Proses Implementasi Bantuan Langsung Tunai.....	101
Tabel 4.29	Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Evaluasi Implementasi Bantuan Langsung Tunai	103

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	Kuisisioner
Lampiran	II	Profil Responden
Lampiran	III	Rekapitulasi Jawaban Responden
Lampiran	IV	Data Nominal
Lampiran	V	Reliabilitas dan Validitas

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu visi pembangunan nasional periode 2004 – 2009 adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dengan salah satu sasaran pokok menurunkan jumlah penduduk miskin dari 16,7 persen tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009.

Saat ini pemerintah menempuh dua strategi utama untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, yaitu dengan 1) meningkatkan pendapatan dan 2) menurunkan beban hidup penduduk miskin. Untuk mewujudkan strategi utama yang kedua, yaitu mengurangi beban hidup penduduk miskin, mulai tahun 2005, pemerintah berupaya untuk dapat menyalurkan dana kompensasi BBM secara langsung kepada keluarga/rumah tangga miskin yang membutuhkan.

Ada banyak program pemerintah yang digulirkan diantaranya adalah melalui pengurangan subsidi BBM yang diperuntukkan untuk meningkatkan sektor pendidikan berupa dana BOS dan BKM, sektor kesehatan berupa Askeskin, sektor pangan berupa Raskin dan sektor prasarana pedesaan berupa bangunan fisik yang disebut infrastruktur pedesaan, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tujuannya guna pemenuhan kebutuhan harian lainnya.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 (Inpres 12 / 2005) Tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin yang dikeluarkan tanggal 10 September 2005. Secara umum, Inpres 12/2005 tersebut mengatur tugas-tugas Menteri dan kepala BPS agar pelaksanaan BLT/SLT (Subsidi Langsung Tunai) dapat berjalan lancar dan tertib.

Kebijakan BLT oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005 akan kurang bermanfaat bahkan salah sasaran apabila tidak dikontrol dan dievaluasi proses implementasinya. Sasaran program tersebut adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi akibat kenaikan harga BBM, akan dapat mengurangi beban hidup masyarakat miskin dari kenaikan harga-harga terutama kebutuhan pokok masyarakat setelah kenaikan BBM tersebut.

Kabupaten Bengkayang, termasuk Kecamatan Siding merupakan salah satu kecamatan yang miskin. Rata-rata penghasilan keluarga masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Berikut disajikan data penduduk Kabupaten Bengkayang sehubungan dengan penduduk miskin.

Tabel 1.1
Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Rumah Tangga Miskin
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkayang

Kecamatan	Rumah Tangga	Rumah Tangga Miskin	Persentase	
			Per-Kecamatan	Per-Kabupaten
Sungai Raya	8592	2611	30,39	18,14
Capkala	1297	563	43,41	3,91
Samalantan	4682	1258	26,87	8,74
Monterado	4672	1707	36,54	11,86
Bengkayang	4403	1241	28,19	8,62
Teriak	2723	1231	45,21	8,55
Sungai Betung	1610	592	36,77	4,11
Ledo	2340	804	34,36	5,59
Suti Semarang	938	509	54,26	3,54
Lumar	1068	446	41,76	3,10
Sanggau Ledo	4822	1101	22,83	7,65
Seluas	2200	1332	60,55	9,25
Jagoi Babang	1276	333	26,10	2,31
Siding	1325	666	50,26	4,63
Jumlah	42038	14394	34,24	100,00

Sumber : BPS Kab. Bengkayang, 2008

Berdasarkan data Kecamatan Siding tergambar bahwa dari 1.325 rumah tangga ternyata penduduk miskin sebanyak 666 rumah tangga atau sebesar 50,26%. Rata-rata keluarga berpenghasilan sebagai petani dan buruh tani.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkayang, hanya sebagian kecil dikategorikan sasaran penerima BLT tidak layak. Kemudian setelah dilakukan verifikasi (coklit) di lapangan, ternyata cukup banyak rumah tangga yang seharusnya tidak layak mendapat Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan kartunya harus ditarik, sebesar 22% tidak tepat sasaran. Hal ini sangat berat bagi petugas

karena pada kenyataannya proses coklit tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat karena kartu yang sudah dicetak dianggap sudah harus diterima rumah tangga. Akibatnya sebagian besar KSK, Kades, Ketua RT, dan petugas lapangan dalam kondisi terancam bahkan ada kepala dusun yang ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Penjelasan apapun yang disampaikan oleh petugas sangat sulit diterima untuk masyarakat. Kasus tersebut terjadi pada 6 desa di Kecamatan Siding.

Berdasarkan data lapangan dari 666 rumah tangga miskin, setelah diverifikasi terdapat 133 rumah tangga atau 20% yang dibatalkan, tetapi kemudian dalam survei lanjutan ternyata jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Siding tersebut bertambah sejumlah 157 rumah tangga miskin yang mendapat program BLT. Keseluruhan Kecamatan Siding terdata sebagai penerima program BLT sejumlah 690 rumah tangga miskin.

Akibat dari tekanan sebagian petugas tidak bersedia lagi mendistribusikan kartu; petugas hanya sampai di Kecamatan dan petugas kecamatan yang menyalurkan kartu; kartu diserahkan petugas tanpa verifikasi. Keadaan ini sangat merugikan karena berpengaruh pada pendataan susulan/tambahan tahap ke dua, dimana banyak masyarakat yang benar-benar miskin yang kebetulan terlewatkan dalam pendataan menjadi sulit untuk di data karena petugas tidak berani dan tidak mau lagi melakukan pendataan susulan ke rumah tangga miskin yang layak dapat namun terlewat pada pendataan pertama.

B. Perumusan Masalah

Sebelum program ini berlangsung wilayah kecamatan Siding cukup kondusif dan mereka bahkan cukup sibuk dengan pekerjaan rutinitas sehari-hari. Namun setelah masyarakat mengetahui data hasil PSE05 digunakan sebagai dasar pengalokasian dana kompensasi BBM melalui BLT, akhirnya banyak masyarakat mengintimidasi petugas, bahkan tidak menutup kemungkinan menyebabkan terjadinya penyimpangan pada tingkat nara sumber informasi atau mungkin juga petugas, yaitu dengan memasukkan keluarga dan kerabatnya yang sebenarnya tidak miskin.

Dari uraian permasalahan yang dihadapi dalam implementasi BLT kepada penduduk miskin di Kecamatan Siding, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi masyarakat miskin terhadap efektivitas dan dampak implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Siding ?.
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan kendala implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Siding ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian di Kecamatan Siding adalah :

1. Menganalisis efektivitas dan dampak implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagaimana dipersepsikan masyarakat miskin di Kecamatan Siding.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Siding.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk memperkaya hasanah mengenai Bantuan Langsung Tunai.

1. Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pemangku kepentingan atau para pengambil keputusan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang maupun Pusat untuk bersama-sama mencari jalan keluar sehingga pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dan tidak menimbulkan dampak salah sasaran.
2. Manfaat teoritis yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk membuktikan Analisis Implementasi yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan serta pengaruh positif baik bagi masyarakat setempat maupun kinerja pemerintah daerah sendiri.



BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Kajian Teoretik

1. Kemiskinan di Indonesia

Masalah kemiskinan memang telah ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, dan pengangguran.

Proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan yang didukung oleh teori Lewis dikutip oleh Tambunan

(2001:59) mengasumsikan bahwa "perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama". Dapat dijelaskan bahwa di pedesaan pertumbuhan penduduk tinggi maka terjadi kelebihan suplai tenaga kerja dan tingkat hidup masyarakatnya rendah. Kelebihan tenaga kerja ditandai dengan tingkat upah rendah.

Dilihat dari ilmu ekonomi pembangunan (*development economics*) dijelaskan bahwa alokasi sumber-sumber daya secara efisien dan pertumbuhannya yang berkelanjutan, juga termasuk mekanisme ekonomis, politis dan institusional diperlukan untuk menciptakan perbaikan yang cepat dan besar-besaran atas tingkat hidup penduduk, karena pembangunan ekonomi yang dilaksanakan mengharapkan suatu hasil yang dapat mendatangkan pendapatan dimana tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Dilihat dari realitas kehidupan masyarakat di pedesaan dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun secara keseluruhan bahwa mereka akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi. Persoalan yang menghendaki atau menuntut seseorang atau suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Menurut pendapat Sukirno (2003:4) kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai "kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun masyarakat untuk

memproduksi barang atau jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut". Dalam melakukan kegiatan ekonomi dimaksud seseorang atau masyarakat akan berada pada posisi memilih beberapa alternatif yang tersedia, pada akhirnya akan menentukan pilihan alternatif yang terbaik.

Banyak model ekonomi yang didasarkan atas sejumlah asumsi implisit tentang perilaku manusia dan hubungan-hubungan ekonomis yang sering tidak ada kaitannya dengan realita di negara-negara berkembang. Oleh karena itu dasar-dasar pikiran nilai (*value premises*) etika dan normatif tentang apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan merupakan ciri utama ilmu ekonomi pada umumnya, dan ilmu ekonomi pembangunan pada khususnya. Konsepsi ekonomi pembangunan dan modernisasi menyangkut dasar-dasar pikiran nilai secara langsung dan tidak langsung tentang tujuan yang diinginkan untuk mencapai realisasi potensi manusia.

Pada kenyataannya pembangunan ekonomi saat ini seolah-olah mandeg. Distribusi pendapatan antara mereka yang kaya dengan yang miskin semakin jauh. Pembangunan oleh pemerintah tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat khususnya masyarakat miskin. Yustika (2005:24) memberikan contoh bahwa, "implementasi program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Keluarga Sejahtera (PKS) banyak salah sasaran. Kegagalan program di lapangan karena pemerintah hanya melihat bagaimana proyek ini dapat berjalan dan menghabiskan alokasi dana yang ada.

Sebelum 1970-an, pembangunan dilihat sebagai fenomena ekonomis

dimana pertumbuhan tinggi PNB total dan perkapita akan "menetes" (*trickle down*) ke rakyat banyak. Pengertian ini lebih menekankan pertumbuhan daripada masalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan. Pengalaman tahun 1960-an dan 1970-an menunjukkan tingkat pertumbuhan PNB total dan per kapita yang relatif tinggi di negara berkembang, tetapi tingkat hidup rakyat banyak tetap tidak berubah, karena itu tentu ada yang salah dengan pengertian sempit pembangunan. Banyak pakar ekonomi dan pembuat kebijakan mulai menggeser peranan PNB dan mengganti dengan penanggulangan langsung atas kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan pengangguran.

Sementara itu pada tahun 1998, situasi menjadi lebih parah, dengan meningkatnya tingkat inflasi, harga menjadi naik dua kali lipat mengakibatkan jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 118,5 juta jiwa atau 60,6 % jumlah penduduk (Faisal, 2002:41). Menurut Statistik, www.ypr.or.id bahwa "Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta."

Seperti disebutkan bahwa kemiskinan dapat meliputi berbagai aspek. Kemiskinan sangat terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumberdaya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan

pendapatan perkapita yang rendah, dan minimnya investasi. Masih banyak variabel kemiskinan yang melekat pada orang miskin.

Menurut pendapat para ahli tentang kemiskinan yang dikutip oleh Yustika (2005:24-27) dikemukakan sebagai berikut.

- Scott(1979:5), kemiskinan dipandang dari sisi pendapatan rata-rata perkapita.
- Sayogyo(1977:10), parameter kemiskinan diukur dari konsumsi beras per kapita per tahun, yaitu di bawah 420 kg bagi daerah perkotaan dan 320 kg di daerah pedesaan. Perbedaan ini dapat dipahami karena dinamika kehidupan yang berbeda antara keduanya. Penduduk di daerah perkotaan mempunyai kebutuhan yang relatif lebih beragam dari pada daerah pedesaan sehingga mempengaruhi pola pengeluaran.
- Biro Pusat Statistik (1987) memakai patokan angka per kapita pengeluaran Rp20.614,00 untuk penduduk kota dan Rp13.295,00 untuk penduduk desa, yang dihitung selama sebulan untuk mengukur penduduk miskin
- Sastraatmadja (2003:2) mengatakan bahwa berdasarkan ukuran pendapatan, kemiskinan dapat dibedakan dalam kemiskinan *absolut* dan kemiskinan *relatif*, sedangkan berdasarkan pola waktu, dapat diteropong dari (a) *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun; (b) *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (c) *seasonal poverty* adalah kemiskinan musiman yang sering dijumpai seperti pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (d) *accident poverty*, adalah kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.
- Menurut Kartasmita (dalam Sastraatmadja, 2003:2) seseorang dikategorikan miskin secara absolut, apabila tingkat pendapatannya lebih rendah dari pada garis kemiskinan absolut, atau ketika jumlah pendapatannya tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut.
- Arsyad (1999:13) menyatakan bahwa kemiskinan mutlak terkait dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang hidup secara layak. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

- Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia/Lakpesdam (2003:26) mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan hidup. Sementara itu kemiskinan relatif didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup sesuai dengan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan tingkat ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya kepemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi, terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai

fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan kebijakan dan program intervensi multidimensi agar kesejahteraan individu meningkat sehingga dapat terbebas dari kemiskinan. Menurut Suronto dan Wrihatnolo dalam profil kemiskinan Bengkayang (2004:6) kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks seperti lingkaran setan sehingga perlu penanganan dan kebijakan yang menyeluruh. Selanjutnya beliau menggambarkan lingkaran setan dalam diagram sebagai berikut.

Gambar 2.1
Lingkaran Setan Kemiskinan



Sumber : Profil Kemiskinan Bengkayang, 2004

Pendapatan riil yang rendah merupakan sumber dari belenggu pembangunan, rendahnya pendapatan atau kemiskinan menyebabkan tidak terlaksananya faktor lain. Kemiskinan menyebabkan kesehatan menurun, pendidikan terhambat, permintaan rendah, pembangunan terhambat, sumberdaya tidak dapat dikelola dengan baik. Perlu campur tangan pihak ketiga dengan tambahan dana sehingga kemiskinan dapat teratasi, dibarengi dengan pembangunan disektor lain.

Pakpahan dalam Sukardi (1996) mengemukakan bahwa konsep kemiskinan dibedakan atas kemiskinan natural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural melihat kemiskinan sebagai suatu daerah yang rendah kapasitas wilayahnya sehingga penduduknya menjadi miskin atau seseorang yang lemah kondisi fisiknya sehingga kemampuan berusahanya rendah dan mengakibatkan individu tersebut menjadi miskin. Selanjutnya, kemiskinan struktural menunjukkan kondisi bahwa fenomena kemiskinan disebabkan oleh struktur yang membelenggu masyarakat untuk maju secara keseluruhan. Dengan kata lain, unsur kelembagaan telah melahirkan struktur masyarakat yang timpang sehingga terjadi kemiskinan.

Kartasmita dalam Sukardi (1996) mengemukakan konsep kemiskinan kultural yang merujuk pada situasi yang dikaitkan dengan sikap mental seseorang atau masyarakat yang dicerminkan oleh kebiasaan hidup dan sistem budaya yang mereka anut. Kelompok ini cenderung tertutup dan sulit untuk

menerima berbagai bentuk pembaruan karena mereka tidak punya keinginan untuk maju dan cepat merasa puas.

Menurut Todaro (2000), tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu:

1. Tingkat pendapatan nasional rata – rata
2. Tinggi rendahnya tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan.

Salim (1999) mengemukakan bahwa kemiskinan umumnya dilukiskan sebagai rendahnya pendapatan untuk memenuhi kehidupan pokok pendekatan kemiskinan yang didasarkan pada pendapatan ini tidak dengan sendirinya memberikan gambaran yang sempurna atau memadai tentang kemiskinan pada umumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan antara lain:

1. Bagi kelompok termiskin diantara orang-orang miskin, keadaan hidupnya lebih buruk daripada yang dinyatakan dengan angka-angka pendapatan perkapita.
2. Angka-angka tersebut tidak menunjukkan pendapatan riil dan masyarakat pedesaan.
3. Perbandingan pendapatan ini didasarkan pada nilai-nilai mata uang yang selalu berubah di dalam proses tukar menukar sehingga validitasnya meragukan bila dibandingkan dengan taraf-taraf hidup yang ada.

Berdasarkan penelitian Sayogo (1974), untuk menentukan status miskin suatu daerah, dilakukan dengan membandingkan nilai beras perkapita per tahun yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga dengan patokan setara dengan nilai

360 kg perkapita per tahun untuk daerah perkotaan dan 240 kg perkapita per tahun untuk daerah pedesaan. Suatu rumah tangga dikatakan miskin jika rata-rata nilai beras yang dikonsumsi setiap anggota rumah tangga tersebut lebih kecil dibanding nilai beras yang nilainya dihitung dengan mengalikan kuantitas terhadap rata-rata harga berlaku pada tahun tertentu.

Bank Dunia (1976) menetapkan batas kemiskinan adalah US\$ 50 per kapita per tahun. Namun demikian, oleh Sumitro, batas kemiskinan dari Bank Dunia disesuaikan menjadi 420 rupiah (dengan mengalikan kurs dolar di pasar bebas pada tahun 1976) dan rata-rata banyaknya angka rumah tangga digunakan sebagai batas kemiskinan masing-masing untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Ketika dunia gencar membicarakan masalah kemiskinan bangsa Indonesia tidak ketinggalan, salah satunya program kompensasi pengurangan bahan minyak serta Bantuan Langsung Tunai. Masalah kemiskinan ini dirasakan mendesak dan segera dicari jalan keluarnya karena menyangkut masalah kemanusiaan.

Kajian implementasi kebijakan merupakan suatu proses menganalisis gagasan atau program dan cara menjalankan program untuk perubahan tersebut. Dalam menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung (secara efektif) dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan.

Menurut Hadi (astarhadi.blogspot.com), ada beberapa pandangan tentang model implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu yang berusaha menggambarkan proses implementasi kebijakan untuk dapat

dilaksanakan secara efektif. Misalnya pandangan yang dikemukakan Parson (1997: 463) yang membagi garis besar perkembangan model implementasi menjadi empat tahap yaitu :

Pertama, model analisis kegagalan, memandang implementasi sebagai proses interaksi antara penyusunan tujuan dengan tindakan. (Pressman dan Widalvsky: 1973); implementasi sebagai politik adaptasi saling menguntungkan (MC Laughlin: 1975); implementasi sebagai bentuk permainan.

Kedua, model rasional (*top down*) untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses; Van Mater dan Van Horn (1975) memakai pandangan bahwa implementasi perlu memperumbangkan isi atau tipe kebijakan; Hood (1976) memandang implementasi sebagai administrasi yang sempurna; Sebatiar dan Mazmanian (1979) melihat implementasi dari kerangka analisisnya; Grindle (1980) memandang implementasi sebagai proses politik dan administrasi.

Ketiga, kritikan dari pendekatan *bottom up* terhadap model pendekatan *top down* dalam kaitannya dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi antara pemerintah dengan warganya (Lipski 1971); implementasi sebagai proses yang disusun melalui konflik dan tawar menawar (Wetherley dan Lipski; 1977); implementasi harus memakai *multiple frameworks* (Elmord 1978, 1979); implementasi harus dianalisis dalam konteks *institutional structures* (Hjern et. Al, 1978); implementasi merupakan proses alur (Smith, 1973).

Keempat, teori-teori hasil sintesis (*hybrid theories*), di mana implementasi dianggap sebagai evolusi (Majone dan Wildavsky, 1984); implementasi sebagai pembelajaran (Browne dan Wildavsky 1984); implementasi sebagai *policy action continuum* (Lewis dan Flynn, 1978, 1979; Barrel dan Fudge, 1981); implementasi sebagai *circular leadership* (Nakamura dan Smallwood 1980); implementasi sebagai hubungan antar organisasi (Toole dan Montjoy 1984); implementasi sebagai teori kontigensi (Alexander 1985) dan lain sebagainya.

Mazmanian dan Sabatier (1983 : 4) menjelaskan implementasi sebagai suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Selanjutnya dijelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau diumumkan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. Sementara itu pakar lain, Webster dalam Wahab (1991) mengartikan implementasi sebagai sarana yang menyediakan atau melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap suatu tertentu.

Dari sejumlah model teoritis terhadap implementasi kebijakan dan bila dikaitkan dengan dikotomi yang terjadi dalam setiap proses implementasi

kebijakan, pada dasarnya alat-alat pemerintah secara luas memberi perhatian pada studi hubungan bisnis, pemerintah dan pengaruh regulasi negara dan bagaimana kaitannya dengan kebijakan ekonomi/bisnis yang efisien.

Dalam metode penentuan kemiskinan hingga saat ini telah ditemukan empat macam metode pengukuran, antara lain adalah pendekatan garis kemiskinan pendapatan, pendekatan garis kemiskinan pengeluaran, pendekatan karakteristik rumah tangga miskin, dan pendekatan sistemik yang spesifik lokal dan sayang budaya.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam Profil Kemiskinan Bengkulu (2004:16),

“Metode pengukuran kemiskinan yang ditemukan tahun 2001, menggunakan 11 (sebelas) variabel, yaitu : 1) jumlah pakaian, 2) fasilitas air bersih, 3) persentase pengeluaran rumah tangga untuk makanan, 4) kepemilikan rumah, 5) jenis dinding, 6) jenis lantai, 7) sarana jamban, 8) sumber penerangan utama, 9) partisipasi sekolah, 10) sumber keuangan rumah tangga, dan 11) pelayanan kesehatan”.

Selanjutnya menurut BPS Jakarta-Indonesia tentang Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (2005:20), khususnya Pedoman Pelaksanaan KSK/PKSK dan PCL, penentuan keluarga/rumah tangga miskin dilakukan melalui indikator sebagai berikut ;

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal
4. Fasilitas tempat buang air besar (jamban/kakus)
5. Sumber air minum
6. Sumber penerangan utama
7. Jenis bahan bakar untuk memasak
8. Berapa kali dalam seminggu rumah tangga membeli daging/ayam/susu

9. Berapa kali dalam sehari biasanya anggota rumahtangga makan
10. Berapa stel pakaian baru dalam setahun biasanya dibeli oleh/untuk setiap/ sebagian besar anggota rumahtangga
11. Apabila ada anggota rumah tangga yang sakit, apakah mampu berobat ke Puskesmas atau Poliklinik
12. Lapangan pekerjaan utama kepala keluarga/rumahtangga
13. Apakah rumahtangga memiliki barang-barang yang masing-masing bernilai paling sedikit Rp500.000 (tabungan, emas, TV berwarna, Ternak, dan sepeda motor)

Ketigabelas variabel tersebut menentukan tingkat kemiskinan seseorang, semakin tinggi indeks skor tingkat kemiskinan maka semakin miskin kondisi rumah tangga tersebut. Metode pengukuran kemiskinan dipergunakan dalam penyaluran bantuan pemerintah dalam menentukan masyarakat miskin yang patut untuk menerima bantuan. Pada kenyataannya bantuan kepada masyarakat miskin bukan merupakan solusi terbaik, tetapi hanya untuk menutupi kemelaratan sesaat. Karena sehabis bantuan tersebut masyarakat akan miskin kembali seperti sediakalanya. Berdasarkan temuan-temuan malah terlihat penyimpangan bantuan kepada mereka yang status sosialnya lebih mampu.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan diperlukan cara-cara dan metode yang perlu dipikirkan lebih matang lagi, sebaiknya dengan menciptakan lapangan kerja baru, memberikan keterampilan sesuai bakat dan minat. Pembangunan lebih diarahkan pada upaya optimalisasi potensi setiap wilayah berdasarkan kondisi sumber daya alam, manusia, dan lingkungan. Sementara itu, bagaimana pelaksanaannya tergantung dari kreativitas dan energi masyarakat yang bersangkutan. Menurut pendapat Korten (dalam Yustika, 2007:124) model pembangunan seperti itu disepadankan dengan pengertian pembangunan yang

memihak pada rakyat, dimana terdapat penekanan akan pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal.

Menurut Suronto dan Wrihatnolo dalam profil kemiskinan Bengkulu (2004:6) pembangunan kemudian diartikan sebagai proses multi dimensional yang menyangkut perubahan besar dalam struktur sosial, sikap, dan institusi nasional, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, penurunan kesenjangan, dan penghapusan kemiskinan.

Hill (2001:251) berpendapat sebagai berikut.

“Berdasarkan indikator sosial timbulnya kemiskinan, kesenjangan, tingkat gizi, upah, pendidikan dan kesehatan diperlukan pembangunan aspek sosial. Tiga alasan yang mendukung, pertama, aspek sosial merupakan ukuran yang paling jelas dari hasil pembangunan ekonomi. Kedua, keterikatan antara pendapatan tinggi menghasilkan kapasitas untuk, misalnya gizi dan kesehatan, selanjutnya akan meningkatkan produktivitas. Ketiga, kemajuan sosial akan berperan dalam kohesi dan kerukunan masyarakat. Pembangunan ekonomi secara inheren adalah proses yang mengganggu dan tak seimbang”.

Pada hakekatnya, pembangunan harus menunjukkan perubahan sistem sosial secara keseluruhan yang diarahkan pada kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok sosial dalam sistem tersebut.

Menurut Joseph dan Parker (2000:16) pemerintah mempunyai tujuan pembangunan ekonomi, antara lain : “1) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, 2) kesempatan kerja penuh akan sumber daya ekonomis, termasuk tenaga kerja, 3) tingkat inflasi yang rendah, dan 4) neraca pembayaran yang kuat diimbangi dengan nilai mata uang yang kuat”.

Dengan pembangunan yang dilakukan secara baik dan

berkesinambungan diharapkan nantinya didapatkan perbaikan kehidupan dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin. Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan konsumsi keluarga sehingga peningkatan kesehatan keluarga. Produktivitas akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesehatan. Salah satu indikator peningkatan perekonomian masyarakat ditandai dengan konsumsi keluarga yang semakin baik dilihat dari pengeluarannya.

Hubungan antara meningkatnya konsumsi (C) rumah tangga yang dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan pendapatan (Y). Peningkatan pendapatan tidak selalu dikeluarkan dalam bentuk konsumsi, untuk langkah berjaga-jaga biasanya konsumen menyimpannya dalam bentuk tabungan (S). Menurut Sukirno (2001:118), dalam ruang lingkup perekonomian masyarakat terdapat dua sektor keseimbangan perekonomian, akan tercapai apabila $Y = C$; $Y = C + S$.

Pada saat pendapatan sedikit maka orang akan menggunakannya sebagai konsumsi, artinya semua pendapatan dipergunakan untuk konsumsi. Seiring dengan perubahan orang akan mencari pendapatan yang lebih, kemudian dengan peningkatan pendapatan tersebut sebagian dipergunakan untuk konsumsi dan sebagian lainnya ditabung untuk keperluan berjaga-jaga.

2. Program Pengentasan Kemiskinan Oleh Pemerintah

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilaksanakan melalui berbagai program antara lain Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis

Ekonomi (PDM-DKE), Program Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS), Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-KES). Seluruh program JPS tersebut dirasakan masih belum menyentuh masyarakat miskin. Termasuk dengan diberlakukannya program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pengadaan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), dan lain-lain.

3. Dimensi Dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional.

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam

kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (*power*) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup aras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep

ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Menurut para ahli pengertian pemberdayaan antara lain :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995: 56).
- b. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987: xiii).
- c. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984: 3).
- d. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al, 1994:106).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau

hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses

4. Program BLT

Kebutuhan minyak dalam negeri terus meningkat melebihi produksi minyak dalam negeri, untuk menutupi kekurangan minyak dalam negeri pemerintah melakukan impor minyak. Saat ini harga minyak melambung tinggi, hampir tiga kali lipat dari harga sebelumnya, kenaikan ini menyebabkan biaya impor minyak meningkat tajam. Menjaga harga minyak dalam negeri tetap murah, pemerintah memberikan subsidi BBM dan bila harga tetap dipertahankan. Desaran subsidi BBM yang dibutuhkan hampir menghabiskan seperempat belanja negara.

Saat ini masyarakat yang menikmati subsidi BBM, sebagian besar kelompok masyarakat yang mampu, yang memiliki kendaraan bermotor pribadi lebih dari satu. Adalah tidak adil jika uang negara digunakan terus menerus untuk mensubsidi masyarakat mampu, oleh karena itu pemerintah mengalihkan biaya subsidi ini untuk masyarakat miskin.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS). RTS adalah rumah tangga yang masuk dalam katagori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Tujuan dari program BLT bagi rumah tangga sasaran adalah membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Pelaksanaan program BLT untuk rumah tangga sasaran (BLT-RTS) harus menyentuh dan memberi manfaat kepada masyarakat miskin, mendorong tanggung jawab sosial bersama serta dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat terhadap perhatian pemerintah kepada masyarakat miskin.

Pemerintah berupaya mengedepankan peran partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Teori *Bottom Up*. Dalam hal ini pemerintah berharap masyarakat dapat terpacu untuk bisa menembus perangkap kemiskinan yang melekat pada dirinya sehingga dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya adalah dengan diberlakukannya PKPS BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), yaitu dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat miskin agar mampu melaksanakan berbagai kegiatannya dan bangkit dari keterpurukan akibat kenaikan harga BBM serta dampak krisis ekonomi. Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan kepada masyarakat miskin sebesar Rp. 100.000,- per kepala keluarga per bulan sebagai kompensasi dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar kendaraan bermotor (BBM).

Agar suatu komunitas atau masyarakat mampu bertahan hidup dan berjuang keluar dari perangkap kemiskinan, diperlukan berbagai kekuatan sebagai sarana utama dalam ekonomi keluarga. Jika basis kekuatan ekonomi keluarga runtuh dan tidak dimiliki oleh masyarakat atau keluarga maka dapat dipastikan proses kemiskinan akan sedikit demi sedikit masuk dalam kehidupan keluarga. BLT merupakan suatu pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin secara terpadu dan menyeluruh.

5. Data BLT Secara umum

Berdasarkan informasi yang bersumber dari situs <http://www.kompas.com> yang dikutip tanggal 30 Oktober 2008 menyebutkan bahwa efektivitas pemberian BLT sebagai kompensasi dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak hanya mencapai 54,96 persen. Tingkat efektivitas menunjukkan seberapa jauh BLT dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin penerima bantuan.

Pemantauan yang menemukan tingkat efektivitas BLT telah dilakukan oleh 56 perguruan tinggi dan lima organisasi, yakni Nahdatul Ulama (NU), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat.

Pemantauan tersebut dilakukan di 33 provinsi pada bulan Oktober hingga November 2005. Perhitungan efektivitas yang diperoleh dari pemantauan itu menunjukkan, sekitar 45 persen rumah tangga miskin penerima

BLT tidak merasakan bantuan itu meringankan beban pengeluaran mereka yang semakin berat akibat kenaikan harga BBM. Pemantauan yang sama juga menunjukkan ketepatan sasaran BLT mencapai 90,26 persen dan ketepatan jumlah bantuan yang diterima berkisar 88 persen.

Sejumlah kalangan mengusulkan BLT diberikan secara bersyarat terkait dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan, atau dialokasikan untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini belum dipastikan berapa persentase penerima yang betul-betul membutuhkan bantuan tunai untuk menyambung hidup. Juga berapa banyak yang lebih tepat menerima subsidi langsung tunai bersyarat, atau subsidi yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Kebijakan tentang kelanjutan skema BLT dipastikan akan ditetapkan pemerintah menjelang berakhirnya pelaksanaan tahap empat.

Berdasarkan pendataan ulang yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga yang berhak menerima BLT bertambah 4.341.979 keluarga, sehingga berjumlah total 19.341.264 rumah tangga miskin. Jika satu keluarga miskin beranggotakan sekitar empat orang saja, berarti penduduk miskin di negeri ini sudah mencapai 80 juta jiwa.

6. Data BLT Kecamatan Siding

Kecamatan Siding yang terdata sebagai kecamatan penerima program BLT terdapat sebanyak 8 desa yang terdiri dari 666 rumah tangga miskin (3.394 jiwa) dari 1.325 rumah tangga (7.140 jiwa). Berdasarkan kenyataan tersebut sebanyak 50,26% dari jumlah penduduk adalah rumah tangga miskin.

Berdasarkan survei lanjutan tahap pertama hanya 533 rumah tangga miskin dari 666 rumah tangga yang dibenarkan sebagai penerima BLT (20% ditolak). Kelanjutan dari implementasi kegiatan BLT dilakukan survei lanjutan tahap kedua, ditemukan rumah tangga miskin baru sejumlah 157 rumah tangga, sehingga penerima BLT di Kecamatan Siding bertambah menjadi 690 rumah tangga miskin.

Lebih jelasnya rumah tangga penerima BLT di Kecamatan Siding dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Penerima BLT Berdasarkan Desa Di Kecamatan Siding

No	Nama Desa	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Miskin	Verifikasi Tahap I	Verifikasi Tahap II
1	Siding	227	98	68	98
2	Tamong	144	69	60	69
3	Sungkung I	132	89	72	89
4	Hli Buei	153	77	65	77
5	Tangguh	171	70	65	70
6	Tawang	148	88	68	88
7	Sungkung II	188	80	65	92
8	Sungkung III	162	95	70	107
	Jumlah	1.325	666	533	690

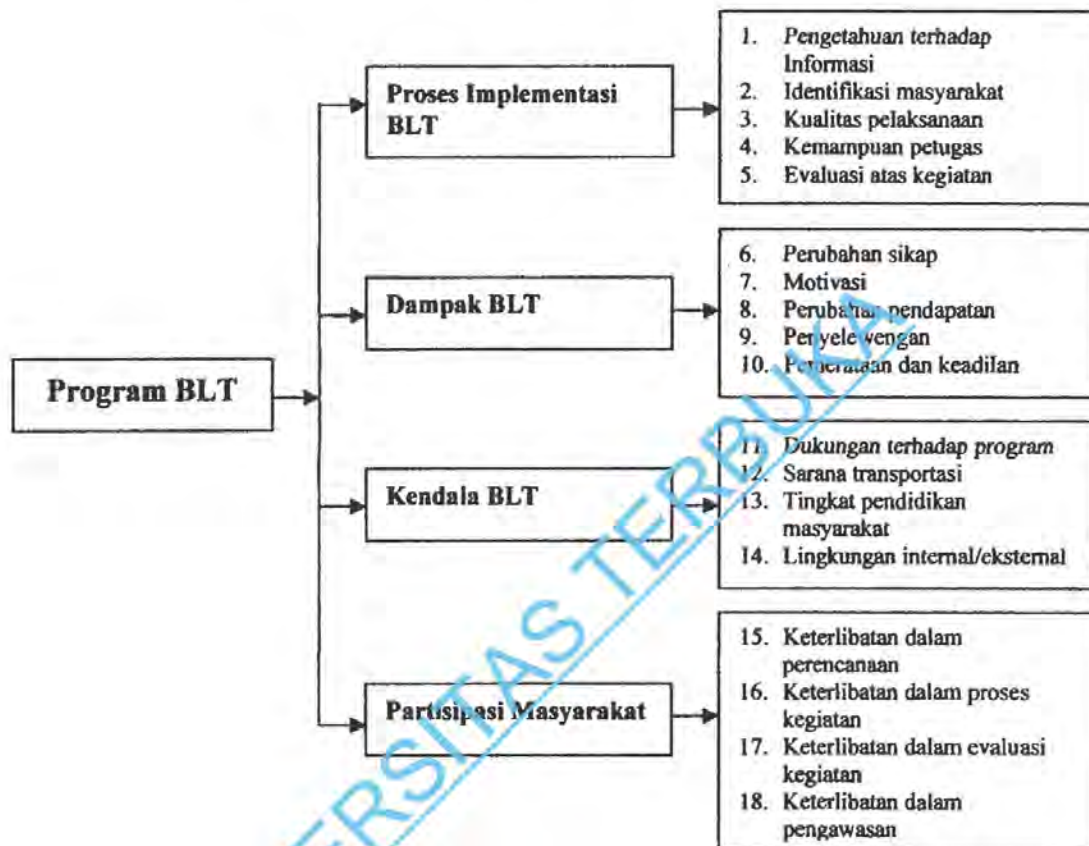
Sumber : BPS Kec. Siding, 2008

B. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dirumuskan dalam bagan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2

Kerangka Penelitian Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Di Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang



Berdasarkan kerangka penelitian pada Gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa implementasi program BLT di Kecamatan Siding dapat dibagi ke dalam empat bagian yaitu :

- **Proses Pelaksanaan BLT**

Proses pelaksanaan BLT dimulai sejak perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah : pendataan atau identifikasi masyarakat penerima BLT yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;

penyampaian atau sosialisasi tujuan berupa visi dan misi program BLT kepada masyarakat; kualitas pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur; kemampuan petugas dalam melaksanakan kegiatan BLT; dan evaluasi atas kegiatan BLT.

- **Dampak BLT**

Pelaksanaan BLT pada masyarakat dapat mengakibatkan beberapa hal, antara lain adalah perubahan sikap masyarakat, adanya motivasi kerja, adanya perubahan pendapatan masyarakat, tingkat penyelewengan pelaksanaan BLT, dan tingkat pemerataan dan keadilan pemberian BLT pada masyarakat.

- **Kendala BLT**

Kendala lapangan berupa kondisi yang mengakibatkan pelaksanaan BLT menjadi terhambat. Kendala yang dapat diidentifikasi adalah dukungan masyarakat terhadap program, sarana transportasi menuju lokasi atau desa dilakukannya BLT, tingkat pendidikan masyarakat, dan lingkungan internal maupun eksternal.

- **Partisipasi Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan dan mendukung kegiatan BLT di lokasi dapat berupa : keterlibatan masyarakat dalam mendukung perencanaan, keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan BLT, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan BLT, serta keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kegiatan BLT.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala sehingga menggunakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif dan kuantitatif.

Metode survei merupakan metode penelitian deskriptif yang digunakan untuk memperoleh data yang ada pada saat penelitian dilakukan. Survei dapat dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk memberikan gambaran tentang sesuatu. Winarno dalam Sudagung, (1987:19) mengatakan bahwa “penelitian deskriptif menggunakan survei meliputi pengumpulan data, penyusunan data dan analisis data serta menginterpretasikan data pada taraf yang terakhir sampai pada kesimpulan”.

Selanjutnya menurut Suryabrata, (2004:19) “metode digunakan untuk membuat suatu deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Artinya penelitian yang dilakukan, dimaksudkan untuk menggambarkan objek penelitian atau melukiskan keadaan yang

sebenarnya guna memperoleh fakta yang kemudian diolah lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan”. Menurut Sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain”

Rancangan penelitian metode survei, merupakan cara mengumpulkan data dari sejumlah responden atau individu dalam waktu (jangka waktu) tertentu. Sementara itu variabel penelitian berupa proses implementasi, dampak program BLT, kendala yang ditemukan, serta partisipasi masyarakat pada akhirnya dapat diungkapkan dengan baik dan jelas sesuai dengan kondisi sebenarnya.

B. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Umar (2003; 77), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapat Bantuan Langsung Tunai yang berdomisili di Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang yang berjumlah 690 kepala keluarga.

2. Sampel

Suatu sampel dikatakan representatif apabila ciri-ciri sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau hampir sama dengan ciri-ciri populasinya. Informasi yang dikumpulkan dari sampel hampir sama dengan informasi yang dapat dikumpulkan dari populasinya. Suatu sampel akan memenuhi syarat bahwa ukuran atau besarnya memadai untuk dapat meyakinkan kesetabilan ciri-cirinya. Berapa besar sampel yang memadai bergantung kepada sifat populasi dan tujuan penelitian. Populasi dalam hal ini adalah masyarakat miskin penerima BLT yang berada di Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang.

Menurut Marzuki (1996:41), "sampel adalah sebagian individu yang diselidiki". Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara *cluster sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan wilayah (Sugiyono, 2003:76). Pemilihan sampel secara *random sampling* dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat data diambil bersamaan dengan kegiatan kunjungan lapangan, kemudian menetapkan sampel/responden pada saat kunjungan tanpa pemilihan sebelumnya. Responden yang dipilih adalah masyarakat penerima BLT.

Penentuan responden hanya pada masyarakat penerima BLT adalah untuk menilai implementasi yang dilakukan oleh pemerintah, sementara itu masyarakat miskin penenerima BLT sebagai objek/subjek kegiatan tersebut.

Adapun penentuan besarnya sampel yang akan diambil dengan menggunakan pendapat Roscoe dalam bukunya *Research Methods For Business* yang dikutip oleh Sugiyono (2003:12-13), memberikan saran-saran tentang ukuran sampel sebagai berikut :

- 1) Ukuran sampel yang layak digunakan dalam penelitian adalah antara 30 s/d 500.
- 2) Bila sampel dibagi dalam kategori (pria-wanita, pegawai negeri-swasta) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.
- 3) Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti.
- 4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing 10 s/d 20

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka besarnya sampel yang akan diambil sebagai responden penelitian adalah sebanyak 30 orang. Proporsional sampel dimaksudkan agar penelitian ini lebih objektifitas tanpa rekayasa sampel sebelumnya.

Tabel 3.1 Jumlah Sampel Berdasarkan Desa Di Kecamatan Siding

No	Nama Desa	Rumah Tangga Miskin Penerima BLT (Orang)	Jumlah Sampel (Orang)
1	Siding	98	4
2	Tamong	69	3
3	Sungkung I	89	4
4	Hli Buei	77	4
5	Tangguh	70	3
6	Tawang	88	4
7	Sungkung II	92	4
8	Sungkung III	107	4
	Jumlah	690	30

Sumber : Data Olahan, 2008

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang mengacu pada permasalahan dan tujuan penelitian, mencakup identifikasi dan seleksi instrumen yang paling cocok dari berbagai alternatif pilihan. Memilih berarti memeriksa instrumen-instrumen yang ada, kemudian berdasar alasan tertentu menentukan instrumen yang dipakai.

Instrumen yang dikembangkan dimaksudkan untuk menilai implementasi program BLT dengan mengembangkan penilaian responden. Mengukur sampel dengan perilaku-perilaku sesuai informasi di lapangan dilakukan dalam upaya membuat instrumen penelitian yang representatif. Instrumen disebut objektif bila skor yang diperoleh individu tidak dipengaruhi oleh orang yang menentukan skor (penilai). Di antara karakteristik instrumen standar, validitas adalah kualitas yang paling penting.

Validitas berkaitan dengan apa yang diukur oleh instrumen dan tingkat kesesuaian instrumen dengan penelitian. Karakteristik penting lainnya adalah reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan konsistensi pengukuran, termasuk rincian mengenai persyaratan penyajian, petunjuk, penyekoran dan petunjuk interpretasi merupakan karakteristik standar.

Sebelum kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengungkap data dalam penelitian, lebih dahulu dilakukan uji coba pada responden yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Pada uji coba alat ukur ini

menggunakan sejumlah 15 responden, yang terdiri dari variabel penelitian terdiri dari variabel proses implementasi, variabel dampak BLT, variabel kendala BLT, dan variabel partisipasi masyarakat. Uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana alat ukur yang akan dipakai sudah benar-benar dapat digunakan sebagai instrumen penelitian yang memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas.

Azwar (2001) mengemukakan bahwa validitas berasal dari kata "*validity*" yang mempunyai arti ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur/instrumen dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut.

Uji validitas instrumen yang dilakukan dengan menggunakan uji validitas konstruk. Uji validitas konstruk yaitu menyusun indikator pengukuran operasional berdasarkan kerangka teori konsep yang akan diukur. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa validitas konstruk dari sebuah instrumen ditentukan dengan jalan mengkorelasikan antara skor masing-masing item dengan total skor masing-masing item. Jika r -hitung lebih besar dari r -tabel pada taraf kepercayaan tertentu, berarti instrumen tersebut memenuhi kriteria validitas. Taraf kepercayaan yang digunakan dalam uji validitas item pada penelitian ini adalah 95% dengan jumlah responden 30 ($n=30$). Item yang memiliki nilai r -hitung $>$ r -tabel (0,361), merupakan item yang digunakan dalam penelitian

Azwar (2001) menjelaskan bahwa reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata *reliability* yang artinya keterpercayaan, keterandalan, konsistensi dan sebagainya. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode *alpha Cronbach* diukur berdasarkan skala *alpha Cronbach* 0 sampai 1. Jika skala itu itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan rentang yang sama, maka ukuran kemantapan *alpha* dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai *alpha Cronbach* 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel
2. Nilai *alpha Cronbach* 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel
3. Nilai *alpha Cronbach* 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel
4. Nilai *alpha Cronbach* 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel
5. Nilai *alpha Cronbach* 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel

Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini mengacu pada tujuan penelitian yang akan dicapai. Berikut ini adalah variabel, konsep variabel beserta indikator penelitian.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Varibel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	Res-ponden
Proses Implementasi	Proses pelaksanaan BLT dimulai sejak perencanaan hingga evaluasi kegiatan	1. Pengetahuan masyarakat terhadap Informasi, Visi/Misi 2. Identifikasi masyarakat penerima bantuan 3. Kualitas pelaksanaan 4. Kemampuan petugas 5. Evaluasi atas kegiatan	Nominal	Kepala rumah tangga (n=30)
Dampak Implementasi BLT	Akibat dari pelaksanaan BLT pada masyarakat	6. Perubahan sikap 7. Motivasi 8. Perubahan pendapatan 9. Penyelewengan 10. Pemerataan dan keadilan	Nominal	Kepala rumah tangga (n=30)
Kendala Lapangan	Kendala lapangan berupa kondisi yang mengakibatkan pelaksanaan BLT menjadi terhambat	11. Dukungan terhadap program 12. Sarana transportasi 13. Tingkat pendidikan masyarakat 14. Lingkungan internal/eksternal	Nominal	Kepala rumah tangga (n=30)
Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan dan mendukung kegiatan BLT	15. Keterlibatan dalam perencanaan 16. Keterlibatan dalam proses kegiatan 17. Keterlibatan dalam evaluasi kegiatan 18. Keterlibatan dalam pengawasan	Nominal	Kepala rumah tangga (n=30)

Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian terhadap 15 responden dengan menggunakan perangkat lunak SPSS diperoleh sebagai berikut :

Tabel 3.3 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Variabel	Indikator	Validitas		Reliabilitas	
		r-hitung	Keterangan	Alpha Cronbach	Keterangan
Proses Implementasi	1. Pengetahuan masyarakat terhadap Informasi, Visi/Misi	0,787	Valid	0,815	Sangat reliabel
	2. Identifikasi masyarakat penerima bantuan	0,683	Valid		
	3. Kualitas pelaksanaan	0,961	Valid		
	4. Kemampuan petugas	0,914	Valid		
	5. Evaluasi atas kegiatan	0,938	Valid		
Implementasi BLT	6. Perubahan sikap	0,689	Valid	0,697	Reliabel
	7. Motivasi	0,496	Valid		
	8. Perubahan pendapatan	0,731	Valid		
	9. Penyelewengan	0,485	Valid		
	10. Pemerataan dan keadilan	0,414	Valid		
Kendala Lapangan	11. Dukungan terhadap program	0,737	Valid	0,719	Reliabel
	12. Sarana transportasi	0,562	Valid		
	13. Tingkat pendidikan masyarakat	0,550	Valid		
	14. Lingkungan internal/eksternal	0,572	Valid		
Partisipasi Masyarakat	15. Keterlibatan dalam perencanaan	0,730	Valid	0,668	Reliabel
	16. Keterlibatan dalam proses kegiatan	0,762	Valid		
	17. Keterlibatan dalam evaluasi kegiatan	0,573	Valid		
	18. Keterlibatan dalam pengawasan	0,000	Tidak valid		

Sumber : Data Olahan, 2008

Hampir semua item pertanyaan untuk masing-masing variabel penelitian mempunyai nilai korelasi (r-hitung) lebih besar dari 0,361 atau *valid*. Dengan demikian item pertanyaan yang terdapat pada semua variabel penelitian dapat dinyatakan memenuhi syarat validitas terkecuali variabel partisipasi masyarakat pada indikator keterlibatan dalam pengawasan, yang selanjutnya indikator ini dibuang. Hasil penghitungan reliabilitas *alpha Cronbach* diperoleh nilai yang lebih besar dibandingkan nilai standar 0,600. Dengan demikian seluruh item pertanyaan pada variabel penelitian dapat dinyatakan reliabel.

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data diperoleh dari dua sumber, yaitu dari responden langsung (data primer) yang dijadikan sampel penelitian dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen dan data pendukung dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian.

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer diperoleh dari responden yang dikumpulkan melalui kuesioner, seperti data kualitas tentang proses implementasi, dampak implementasi, kendala implementasi, dan partisipasi masyarakat.
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utamanya melainkan sudah diolah pihak lain dan digunakan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder berbentuk dokumentasi BLT, data penduduk, dan lain-lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

- a) Kuisisioner, merupakan sejumlah pertanyaan yang disusun untuk diajukan pada responden. Instrumen kuisisioner berupa pertanyaan yang mengarah pada pengumpulan data tentang proses implementasi, dampak implementasi, kendala implementasi, dan partisipasi masyarakat.

- b) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Data observasi berupa pengamatan secara langsung perilaku masyarakat dan fasilitas pelayanan yang disediakan oleh pelaksana BLT, serta dampak nyata dari implementasi BLT.
- c) Wawancara, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang terpilih secara random sesuai dengan kuesioner yang telah dibuat sebelumnya. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh lebih dalam informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, karena diketahui bahwa sebagian besar penduduk hanya mengerti bahasa setempat.
- d) Dokumentasi: data yang diperoleh dari sumber lain berupa dokumen pemerintah (Juklak/Juknis) tentang BLT, instansi terkait, internet, dan lainnya yang digunakan dalam penelitian.
- e) Studi Kepustakaan, dilakukan pengumpulan data dengan melihat buku-buku tentang pendapat yang berkaitan maupun teori-teori atau literatur dari para ahli

Table berikut menyajikan jenis data dan teknik pengambilan data dalam penelitian.

Tabel 3.4 Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data

No	Item	Jenis Data	Sumber Data	Teknik
1	Variabel Penelitian : Proses Implementasi ; Dampak Implementasi BLT ; Kendala Lapangan ; Partisipasi Masyarakat	Primer	Responden	Wawancara
2	Gambaran Umum Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang	Primer/ Sekunder	Kantor Kecamatan	Wawancara/ dokumentasi
3	Data Penduduk	Sekunder	Kantor Kecamatan, Desa, Dusun, RT/KW	Wawancara/ dokumentasi
4	Pedoman Pelaksanaan KSK/PKSK dan PCL	Sekunder	Kantor Kecamatan, Desa	dokumentasi

Sumber : Data Olahan, 2008

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang, dari 42.038 rumah tangga, sebanyak 14.394 jumlah rumah tangga miskin, atau sekitar 34,24 persen penduduknya rumah tangga miskin.
- b. Kecamatan Siding merupakan kecamatan baru pemekaran dari Kecamatan Jagoi Babang dan masih memerlukan perhatian dalam penataan pembangunan disegala bidang, mempunyai 1.325 rumah tangga dan memiliki 666 rumah tangga miskin atau 50,26 persen penduduknya miskin.

Pertimbangan yang menyebutkan bahwa Kecamatan Siding merupakan kecamatan yang penduduknya miskin diantara kecamatan di Kabupaten Bengkayang. Jalur transportasi sebagian besar adalah jalan setapak untuk mencapai sebagian besar desa, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga dimungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut jika dilihat dari segi perekonomian, sosial dan politik dimasa yang akan datang.

E. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2003:169) bahwa analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden atau dari sumber lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, merupakan upaya untuk mengungkap gambaran data empiris secara nyata dengan kondisi apa adanya dari variabel-variabel penelitian dan menginterpretasikan hasil pengolahan data melalui tabulasi frekuensi serta mengungkap kecenderungan data dilihat dari rata-rata. Hasil analisis deskriptif berguna untuk mendukung interpretasi terhadap hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Bengkayang terletak antara 108,39° Bujur Timur sampai 110,04° Bujur Timur dan antara 0,33° lintang Utara sampai 2,02° Lintang Utara. Luas Wilayah Kabupaten Bengkayang adalah 5.396,30 Km² atau 539.630 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selakau, Tebas, Sambas, Sijangkung dan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kunyit, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, serta Kecamatan Menjalin, Kecamatan Mempawah Hulu, Kecamatan Menyuke dan Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Serawak Malaysia Timur dan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna. dan Pemerintah Kota Singkawang.

Batas dan luas wilayah Kabupaten Bengkayang menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

**Batas Dan Luas Daerah Kabupaten Bengkayang
Menurut Kecamatan Tahun 2006**

No	Kecamatan	Batas-batas Wilayah				Luas Daerah
		Utara	Selatan	Timur	Barat	
1	Sungai Raya	S. Raya Kepulauan	Kab. Pontianak	Capkala	Law Nama	75,85 Km'
2	Capkala,	S. Raya Kepulauan	Kab. Pontianak	Monterado	Sungai Raya	46,35 Km'
3	Sui Raya kepulauan	Kota Singkawang	Sungai Raya	Monterado	Lana Natuna	394,00 Km'
4	Samalantan	Lembah Bawang	Kab. Landak	Sung. Betung	Monterado	420,50 Km'
5	Monterado	Kota Singkawang	Kab. Pontianak	Samalantan	Capkala	291,00 Km'
6	Lembah Bawang	Kota Sambas	Samalantan	Lumar	Monterado	188,00 Km'
7	Bengkayang	Lumar	Kab. Landak	Teriak	Sei Betung	167,04 Km'
8	Teriak	Sad Semarang	Kab. Landak	Kab. Landak	Bengkayang	231,51 Km'
9	Sungai Betung	Lumar	Kab. Landak	Bengkayang	Samalantan	205,95 Km'
10	Ledo	Kota Sambas	Sad Semarang	Sanggau Ledo	Lumar	481,75 Km'
11	Suti Semarang	Tujuh Betas	Teriak	Kab. Landak	Ledo	260,84 Km'
12	Lumar	Kota Sambas	Bengkayang	Ledo	Lamb. Wang	275,21 Km'
13	Sanggau Ledo	Kota Sambas	Ledo	Tujuh Belas	Kab Sambas	392,50 Km'
14	Tujuh Belas	Seluas	Suti Semarang	Kab. Landak	Sangau Ledo	221,00 Km'
15	Seluas	Jagoi Babang	Tujuh Belas	Tamong	Kab. Sambas	506,50 Km'
16	Jagoi Babang	Sarawak	Seluas	Siding	Kab. Sambas	655,00 Km'
17	Siding	Serawak	Kab. Landak	Kab. Sanggau	Seluas	563,30 Km'
JUMLAH						5.396,30 Km'

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang, 2008

Pada pertengahan tahun 2006 Kabupaten Bengkayang dimekarkan menjadi 17 Kecamatan dengan penambahan 3 (tiga) Kecamatan baru. Untuk mengetahui jumlah penduduk disetiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Bengkayang Tahun 2006

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sungai Raya	10.063	9.665	19.728
2	Capkala	3.840	3.533	7.373
3	Sui Raya kepulauan	11.787	11.333	23.120
4	Samalantan	8.517	7.850	16.367
5	Monterado	12.965	11.973	24.938
6	Lembah Bawang	2.415	2.263	4.678
7	Bengkayang	9.497	9.039	18.536
8	Teriak	6.234	5.891	12.127
9	Sungai Betung	4.610	4.207	8.817
10	Ledo	7.341	6.914	14.255
11	Suti Semarang	2.479	2.341	4.820
12	Lumar	3.065	2.853	5.918
13	Sanggau Ledo	6.754	5.464	11.218
14	Tujuh Belas	5.865	5.474	11.339
15	Seluas	7.387	6.959	14.346
16	Jagoi Babang	3.662	3.501	7.163
17	Siding	3.628	3.512	7.140
	Jumlah	109.109	102.774	211.883

Sumber : BPS Kab. Bengkayang, 2008

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut penduduk Kecamatan Siding relatif sedikit yaitu 3,37% dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang, perimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sangat tipis, yaitu 50,81% untuk laki-laki dan 49,19% untuk perempuan. Dibandingkan dengan luas wilayah, maka kepadatan dalam satu kilometer dihuni satu jiwa dapat mewakili 0,08 Km² atau 80 Ha, sehingga luasan wilayah Kecamatan Siding masih mempunyai wilayah garapan yang sangat luas.

Tingkat pendapatan regional untuk Kabupaten Bengkayang

berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang hingga akhir tahun 2006 adalah sebesar Rp6.299.384.470.000,- sehingga PDRB perkapita sejumlah Rp6.894.619,97 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan sebesar 10,38%. Peningkatan PDRB perkapita ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang semakin baik.

Berikut disajikan data perkembangan pendapatan regional dan angka perkapita tahun 2003 s.d 2006 sebagai berikut.

Tabel 4.3
Perkembangan Pendapatan Regional Dan Angka Perkapita
Kabupaten Bengkayang (juta rupiah) tahun 2003-2006

Uraian	2003	2004	2005	2006
PDRB atas dasar harga pasar	936,85	1.057,44	1.272,13	1.460,85
Penyusutan	65,58	74,02	89,05	102,26
PDRN atas dasar harga pasar	871,23	983,42	1.183,08	1.358,59
Pajak tak langsung	15,3	17,27	20,78	23,86
PDRN atas dasar biaya faktor produksi	855,97	966,15	1.162,3	1.334,73
PDRB perkapita	4.837,77	5.296,24	6.179,07	6.894,62
Pendapatan regional perkapita	4.420,11	4.838,99	5.645,61	6.299,38

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang, 2008

Peningkatan pendapatan per-kapita penduduk tidak diikuti oleh pengurangan jumlah penduduk miskin, berdasarkan data bahwa Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu penduduk miskin menurut

data Kalimantan Barat tahun 2007. Untuk lebih jelasnya data penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Diverifikasi Tahap II
Menurut Kecamatan

Kecamatan	Rumah Tangga	Rumah Tangga Miskin	Verifikasi Tahap II
Sungai Raya	8.592	2.611	4.546
Capkala	1.297	563	1.018
Samalantan	4.682	1.258	1.617
Monterado	4.672	1.707	2.980
Bengkayang	4.403	1.241	512
Teriak	2.723	1.231	964
Sungai Betung	1.610	592	413
Ledo	2.340	804	381
Suti Semarang	938	509	157
Lumar	1.068	446	95
Sanggau Ledo	4.822	1.101	500
Seluas	2.200	1.332	759
Jagoi Babang	1.276	333	270
Siding	1.325	666	690
Jumlah	42.038	14.394	14.902

Sumber : BPS Kab. Bengkayang, 2008

Berdasarkan Tabel 4.4 dari seluruh jumlah rumah tangga yang ada di Kecamatan Siding ternyata 50,26% adalah rumah tangga adalah miskin. Karena jumlah rumah tangga di Kecamatan Siding terbilang kecil sehingga persentase untuk se-Kabupaten Bengkayang sebesar 4,63%.

Fasilitas jalan merupakan faktor penting yang mendukung lancarnya transportasi suatu daerah. Fasilitas jalan di Kabupaten Bengkayang sudah cukup memadai. Dilihat dari status jalan, sepanjang

1.270 kilometer dengan berbagai status lainnya. Dilihat dari jenis permukaan dan kondisi jalannya, di Kabupaten Bengkayang secara umum sebagian besar jenis permukaan jalan sudah berupa aspal dan dalam kondisi yang baik. Perbedaan hanya dengan jalan antar kecamatan dan antar desa. Sebagian besar jalan adalah tanah, apabila terjadi musim penghujan maka kondisi jalan akan menjadi becek sehingga transportasi terhambat. Fasilitas jalan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Prasarana Transportasi Angkutan Darat
Di Kabupaten Bengkayang

No	Prasarana Transportasi	Panjang (Km)
1	Jalan Aspal	315,60
2	Jalan Kerikil	266,55
3	Jalan Tanah	538,63
4	Lainnya	149,22
Jumlah		1.270,00

Sumber : BPS Kab. Bengkayang, 2008

Selain adanya fasilitas jalan yang sangat berguna bagi transportasi, sarana komunikasi juga sangat penting. Di masa sekarang kelancaran komunikasi sangat berpengaruh seiring dengan adanya teknologi informasi. Jumlah sarana komunikasi di Kabupaten Bengkayang belum memadai. Jalur telekomunikasi antar kecamatan masih minimal apalagi untuk saluran telekomunikasi pedesaan. Hingga saat ini masih belum ada

desa yang terjangkau oleh saluran telekomunikasi, kecuali desa-desa yang berada di jalur yang sama dengan jalur komunikasi antar kecamatan.

B. Proses Implementasi Bantuan Langsung Tunai

Disadari bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidaklah mudah, serta membutuhkan strategi yang terpadu, karena kemiskinan bersifat multi dimensi. Saat ini pemerintah sedang menyusun strategi penanggulangan kemiskinan, agar program-program pengentasan kemiskinan di pelbagai kehidupan dapat dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pada saat yang sama pemerintah juga menginginkan penurunan persentase penduduk miskin dengan cara membantu meringankan beban kehidupan mereka secara langsung. Kedua hal tersebut menuntut ketersediaan data kemiskinan penduduk, baik yang bersifat makro ataupun mikro. Data kemiskinan makro diperlukan untuk target wilayah yaitu bantuan kemiskinan menurut daerah. Data kemiskinan mikro diperlukan untuk target sasaran keluarga/rumah tangga miskin.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 (Inpres 12/2005) Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluarkan tanggal 10 September 2005. Secara umum Inpres 12/2005 tersebut mengatur tugas-tugas pelaksana terkait dalam penyalurannya. Adapun organisasi pelaksana BLT serta pembagian

tugasnya di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut.

1. **Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten**

BPS Kabupaten bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan pendataan di wilayah Kabupaten dan secara proaktif mengatasi semua permasalahan teknis dan non teknis dengan cepat dan tuntas. Dalam tahap persiapan, BPS Kabupaten juga diharuskan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait lainnya, merekrut Instruktur Daerah (Inda), serta petugas lapangan yang berkualitas. Secara khusus, BPS Kabupaten harus membentuk Tim *Taskforce* untuk melakukan supervisi lapangan yang ketat dan memonitor kelancaran arus dokumen (hasil pencacahan) petugas lapangan.

Pemantauan kegiatan dan kemajuan proses pencacahan dilakukan secara harian. Untuk itu, BPS Kabupaten harus membentuk Sekretariat Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) Kabupaten lengkap dengan Telepon/Faximili yang dapat dihubungi setiap waktu. Setiap dokumen yang masuk harus segera diedit dan dientri datanya. Pengelolaan dokumen dilakukan baik sebelum maupun pasca kegiatan lapangan.

2. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)

KSK berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan PSE05 di tingkat kecamatan. KSK bertanggung jawab atas pendistribusian dan penerimaan dokumen, pelatihan petugas bagi kecamatan yang ditunjuk, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi ,kemajuan pelaksanaan lapangan di kecamatan tersebut. Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK) membantu KSK baik dalam hal teknis maupun non-teknis.

KSK dan PKSK dikoordinir oleh BPS Kabupaten membentuk Satuan Tugas (*Taskforce*) di wilayahnya untuk melakukan pendaftaran dan pencacahan penduduk miskin di luar SLS. Satuan tugas juga bertugas untuk memonitor kelayakan jumlah rumahtangga miskin yang dicatat di dalam daftar PSE05.

3. Petugas Pencacahan Lengkap (PCL)

PCL adalah petugas PSE05 terdepan yang mempunyai tugas-tugas antara lain, mengikuti pelatihan petugas lapangan dan melakukan pencatatan keluarga/rumahtangga miskin dari berbagai sumber, yaitu ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS), BKKBN, dan BPS daerah. PCL hanya bertugas di SLS dan di rumahtangga miskin yang terdaftar pada suatu SLS. Segera setelah menyelesaikan tugas pencacahan di suatu SLS, dokumen tersebut langsung diserahkan ke KSK/PKSK. PCL juga siap untuk kembali ke lapangan apabila KSK/PKSK menemukan

kekeliruan.

Penjadwalan kegiatan implementasi BLT di lapangan dibuat dengan target dan pencapaian yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahap implementasi adalah pendataan serta pengadaan dan penyaluran Kartu Kompensasi Bantuan Bahan Bakar Minyak (KKB). Lebih lengkapnya adalah sebagai berikut.

a. Pendataan

1) Persiapan

- a) Penyelenggaraan Rapat Teknis Daerah (Ratekda) termasuk perjalanan peserta Ratekda.
- b) Pelatihan Inda (termasuk perjalanan Inda)
- c) Pelatihan Petugas Pengolahan
- d) Sosialisasi (Di Kabupaten Kota atau Kecamatan)
- e) Pelaksanaan Pelatihan Pencacahan
- f) Pelaksanaan Pencacahan
- g) Pelaksanaan Pengawasan (termasuk perjalanan *taskforce* dan penanggungjawab)
- h) Pengawasan (Dari Propinsi ke Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota ke Kecamatan)
- i) Pengiriman dokumen

2) Pelaksanaan

- a) Peranan Kelompok Kerja (Propinsi dan Kabupaten/Kota)
- b) Peranan Aparat Pemerintah (Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah/Kepala Desa, Aparat lainnya)
- c) Pendataan rumahtangga Miskin
- d) Pengawasan Pelaksanaan Pendataan (Propinsi ke Kabupaten dan Kabupaten ke Kecamatan)
- e) *Taskforce* Pengawasan
- f) Asuransi (kalau ada)

3) Pengolahan

- a) Receiving dan Batching dokumen
- b) Pengolahan dokumen
- c) Pencocokan dan penelitian hasil pengolahan
- d) Pengadaan ATK, *computer supplies*, dan map untuk *batching*.

b. Pengadaan dan Penyaluran Kartu Kompensasi BBM (KKB)**1) Penyaluran KKB Tahap I**

- a) Pengadaan boks pengiriman
- b) Pencocokan, penelitian, dan penyampaian KKB
- c) Pengawasan (Propinsi dan Kabupaten/Kota ke lapangan)
- d) Pengiriman dokumen
- e) Pembahasan dan penggandaan laporan

2) Penyaluran KKB Tahap II

- a) Pengadaan kuesioner verifikasi
- b) *Briefing* Petugas (Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan)
- c) Verifikasi rumah tangga miskin
- d) Pengawasan (Propinsi dan Kabupaten/Kota, KSK)
- e) Pengolahan hasil verifikasi rumahtangga miskin
- f) Pengiriman KKB

Untuk memperoleh informasi tentang keberadaan/lokasi keluarga/ rumahtangga miskin secara lengkap di semua wilayah, pendataan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

- Tahap I

KSK/PKSK menyerahkan Daftar PSE05.WT yang memuat wilayah tugas PCL. Daftar ini dapat terisi sampai pada tingkat SLS terbawah, apabila KSK sudah mempunyai informasi SLS sampai tingkat terbawah di wilayah kecamatannya.

Apabila KSK/PKSK tidak mempunyai informasi SLS di bawah desa kelurahan, maka isian Daftar PSE05.WT hanya terisi sampai pada nama desa/kelurahan saja, dan jika mempunyai informasi sampai satu tingkat di bawah desa/kelurahan, maka Daftar PSE05.WT hanya terisi pada Rukun Warga 001 dan demikian seterusnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Desa/Kelurahan. Selanjutnya Daftar PSE05.SLS tersebut

segera diserahkan kembali kepada KSK/PKSK untuk penyesuaian wilayah tugas sebenarnya, sebelum melakukan pendataan rumahtangga miskin.

- **Tahap II**

Berdasarkan Daftar PSE05.WT yang sudah final dari KSK/PKSK, PCL selanjutnya menemui Ketua SLS di wilayah tugasnya untuk mencatat keluarga/rumahtangga yang diduga miskin oleh Ketua SLS dengan Daftar PSE05.LS

Keluarga/rumahtangga yang diduga miskin adalah mereka yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, kesehatan, dan pendidikan).

Pencatatan keluarga/rumahtangga miskin dimulai dari keluarga/rumahtangga yang paling miskin. Setelah semua rumahtangga yang diduga miskin selesai dicatat PCL, selanjutnya Ketua SLS memberikan paraf di samping nama keluarga/rumahtangga terakhir pada Daftar PSE05.LS dan memberikan pengesahan dengan tanda tangan (pakai bolpen) dan dicap. Kemudian pencatatan keluarga rumahtangga yang diduga miskin dapat dilanjutkan berdasarkan sumber informasi lain (BKKBN/BPS Daerah/Pihak Lain). Pencatatan pada Daftar PSE05.LS ini dilakukan oleh PCL.

Khusus untuk keluarga rumahtangga miskin yang berada di luar SLS resmi (seperti pemukiman liar di pinggiran rel kereta api, bantaran sungai, tempat pembuangan akhir sampah) pencatatan rumahtangga miskin diisikan pada Daftar PSE05.LSK, yang pendaftarannya dilakukan oleh Satuan Tugas (*taskforce*) tingkat kecamatan.

- **Tahap III**

Setiap keluarga/rumahtangga yang diduga miskin pada Daftar PSE05.LS dan PSE05.LSK harus didatangi dan dicacah dengan Daftar PSE05.RT. Pencacahan di SLS dilakukan oleh PCL sedangkan pencacahan di luar SLS resmi oleh Satuan Tugas.

Indikator untuk menentukan keluarga/rumahtangga miskin berdasarkan PSE05 antara lain :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal
4. Fasilitas tempat buang air besar (jamban/kakus)
5. Sumber air minum
6. Sumber penerangan utama
7. Jenis bahan bakar untuk memasak
8. Berapa kali dalam seminggu rumahtangga membeli daging/ayam/susu

9. Berapa kali dalam sehari biasanya anggota rumahtangga makan
10. Berapa stel pakaian baru dalam setahun biasanya dibeli oleh/untuk setiap/ sebagian besar anggota rumahtangga
11. Apabila ada anggota rumah tangga yang sakit, apakah mampu berobat ke Puskesmas atau Poliklinik
12. Lapangan pekerjaan utama kepala keluarga/rumahtangga
13. Apakah rumahtangga memiliki barang-barang yang masing-masing bernilai paling sedikit Rp500.000 (tabung, emas, TV berwarna, ternak, dan sepeda motor)

C. Karakteristik Responden

I. Usia Responden

Usia dapat mempengaruhi seseorang di dalam berpikir, bertindak dan mengambil suatu keputusan. Semakin tinggi usia seseorang maka semakin dewasa dan semakin tinggi pula wawasannya. Seseorang akan memilih sesuatu yang diinginkannya dan diminatinya dengan melihat kondisi tubuhnya, yang dipengaruhi oleh usia seseorang. Untuk mengetahui usia dari 30 orang responden yang dijadikan sampel penelitian, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6. Responden Berdasarkan Tingkat Usia

U s i a	Frekuensi	Persentase
40 – 49	7	23,33
50 – 59	17	56,67
60 – 69	6	20,00
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Menurut Tabel 4.6, menjelaskan bahwa mereka yang menjadi responden adalah mereka yang mempunyai tingkat kematangan pengalaman dan wawasan yang cukup dalam kemampuan pengambilan keputusan serta mereka yang mempunyai pengetahuan yang cukup dalam pengambilan tindakan.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin menandakan perbedaan struktur tubuh manusia, membedakan kemampuan fisik, membedakan tingkat emosional seseorang, membedakan peran dan tanggung jawab serta status. Untuk beberapa daerah atau wilayah tertentu jenis kelamin mempunyai arti yang berbeda-beda pula. Paradigma umum perbedaan jenis kelamin adalah bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya dalam hal mencari nafkah, sedangkan perempuan mempunyai tanggung jawab dalam hal mengurus keluarganya.

Data responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	22	73,33
Perempuan	8	26,67
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar jenis kelamin responden adalah laki-laki, dapat diartikan bahwa responden mempunyai tingkat tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga sehingga lebih berani dalam pengambilan keputusan dan lebih terbuka. Pada umumnya jenis kelamin laki-laki mempunyai tingkat wewenang yang lebih tinggi baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

3. Tingkat Pendidikan

Adanya perbedaan tingkat pendidikan membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan, berpikir dan wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin kritis dan selektif di dalam memilih atau memutuskan, sejalan dengan itu akan mempunyai wawasan yang cukup dalam menganalisa sesuatu.

Data responden menurut tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.8. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Tidak Sekolah	7	23,33
Tidak Tamat SD	13	43,33
Tamat SD	10	33,33
Jumlah	30	99,99

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.8, terlihat bahwa responden didominasi oleh tingkat pendidikan tidak tamat SD dan tamat SD, walaupun demikian mereka yang tidak tamat SD mempunyai kemampuan dalam membaca dan menulis. Berdasarkan data bahwa tingkat pendidikan responden adalah yang tertinggi dari keseluruhan populasi. Mereka mempunyai kemampuan dan wawasan yang cukup dalam memberikan informasi dan dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat tempat mereka berdomisili.

4. Status Perkawinan

Ukuran lain yang menandai seseorang sudah dewasa adalah dengan melihat dari status perkawinan. Seseorang yang sudah menikah dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai kemampuan dalam memilih dan lebih bijaksana dalam menentukan sesuatu. Adapun data responden menurut status perkawinan yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.9. Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Status Perkawinan	Frekuensi	Persentase
Kawin	18	60,00
Janda	7	23,33
Duda	5	16,67
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden adalah berstatus kawin. Berdasarkan kenyataan tersebut bahwa latar belakang responden yang sudah menikah mempunyai beban tanggung jawab dalam menutupi kehidupan keluarganya.

5. Pekerjaan

Pekerjaan menandakan bahwa seseorang mempunyai kemampuan dalam berusaha serta menggambarkan tanggungjawab terhadap diri dan keluarganya. Misalnya dengan bekerja seseorang mempunyai kemampuan finansial yang dimilikinya mendukung dalam membuat atau memilih keputusan yang ditentukannya. Seseorang akan dipandang dan diperhatikan di lingkungannya serta bertindak dalam memutuskan sesuatu dapat dipengaruhi oleh tingkat penghasilannya, dimana penghasilannya diperoleh dari pekerjaan yang dilakukannya.

Berikut ini akan disajikan data responden menurut pekerjaan yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.10. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Petani	18	60,00
Buruh	12	40,00
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.10, dapat dikatakan bahwa seluruh responden adalah sudah bekerja. Dengan kenyataan tersebut bahwa latar belakang responden yang sudah bekerja sebagai petani dan buruh adalah merupakan usaha dalam menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Pekerjaan tersebut dilakukan karena keterbatasan kemampuan dan kesempatan kerja di desa dan tidak ada alternatif usaha yang ada yang dapat dilakukan dan tidak adanya peluang.

6. Penghasilan

Penghasilan merupakan buah/upah dari pekerjaan yang dilakukan. Bagi kepala keluarga besaran penghasilan yang diterima dari hasil pekerjaan akan dipergunakan untuk menutupi kebutuhan keluarga. Besarnya penghasilan yang diperoleh diharapkan dapat membantu kesulitan yang dihadapi. Besarnya penghasilan yang diterima seseorang

tergantung dari banyak faktor, sehingga penghasilan setiap orang akan berbeda-beda.

Untuk mengetahui besarnya penghasilan rata-rata responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11. Responden Berdasarkan Besarnya Penghasilan

Penghasilan	Frekuensi	Persentase
Rp150.000 s.d Rp225.000	19	63,33
Rp226.000 s.d Rp300.000	11	36,67
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat digambarkan bahwa tingkat penghasilan responden yang menerima bantuan masih berada di tingkat penghasilan yang memprihatinkan. Dengan tingkat penghasilan tersebut mereka tidak akan mampu untuk menopang kebutuhan keluarga, sehingga akan banyak pengurangan dan pengorbanan yang harus dilakukan. Kenyataannya Upah Minimum Provinsi sebesar Rp.580.000,-

7. Jumlah Tanggungan Orang Tua

Biaya hidup anak beserta keluarganya menjadi tanggungan orang tua, semakin banyak jumlah keluarga yang harus ditanggung maka semakin berat beban yang harus dipikul orang tua dalam menafkahiya. Untuk melihat jumlah tanggungan orang tua terhadap keluarganya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12. Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan

Jumlah Tanggungan	Frekuensi	Persentase
2 – 3 orang	6	20,00
4 – 5 orang	16	53,33
6 – 7 orang	8	26,67
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa jumlah tanggungan tersebut tidak termasuk orang tua, dapat dikatakan bahwa jumlah tanggungan responden rata-rata ternyata di atas jumlah tanggungan keluarga ideal. Dengan banyaknya jumlah tanggungan orang tua sehingga beban orang tua akan menjadi lebih berat.

D. Analisis Efektivitas dan Dampak Implementasi

1. Proses Implementasi

Implementasi sebagai suatu proses yang sudah terprogram dan terstruktur yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang ada di dalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Proses implementasi dalam hal ini membahas tentang pengetahuan masyarakat terhadap program Bantuan Langsung Tunai, proses

identifikasi masyarakat penerima bantuan, kemampuan petugas, dan evaluasi atas kegiatan pelaksanaan program. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kegiatan.

a. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Visi/Misi dan Informasi

Visi merupakan pandangan ke depan yang akan dicapai merupakan suatu target yang harus dipenuhi. Untuk pencapaian visi perlu disusun atau diuraikan dengan bagian-bagian kegiatan kecil pencapaian atau dibagi ke dalam kurun waktu/periode yang sering disebut misi.

Data mengenai tanggapan responden terhadap sosialisasi visi/misi serta informasi tujuan program BLT oleh pelaksana kepada masyarakat dan penilaian kinerja proses implementasi disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.13
Tanggapan Responden Terhadap Sosialisasi Visi/Misi dan Informasi Tujuan

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat jelas	0	0,00
Cukup jelas	11	36,67
Kurang jelas	9	30,00
Tidak jelas	7	23,33
Sangat tidak jelas	3	10,00
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.13, sosialisasi visi/misi dan informasi tujuan program bantuan dinyatakan cukup jelas oleh sebanyak 11

responden (36,67%), kurang jelas sebanyak 9 responden (30,00%), tidak jelas sebanyak 7 responden (23,33%), dan sangat tidak jelas sebanyak 3 responden (10,00%).

Responden yang menyatakan cukup jelas memberikan alasan bahwa sosialisasi visi/misi program BLT diperoleh dari petugas yang mendata ke rumah warga. Responden yang menyatakan kurang jelas, tidak jelas dan sangat tidak jelas memberikan alasan bahwa petugas yang mendata ke rumah warga hanya meminta persetujuan atas formulir yang sudah diisi dan memberikan penjelasan bahwa mereka akan memperoleh uang dari pemerintah atas kompensasi kenaikan harga BBM. Beberapa responden memberikan alasan bahwa mereka tidak pernah didata dan diberikan penjelasan oleh petugas tetapi termasuk dalam daftar penerima bantuan.

Proses implementasi program bantuan dalam memberikan pelayanan sosialisasi visi/misi dan informasi tujuan kepada masyarakat sesungguhnya sudah dilakukan melalui proses pendataan warga, akan tetapi informasi yang diterima kurang direspon dengan baik oleh warga. Indikasi kecurangan petugas dalam memberikan data, memungkinkan beberapa warga tidak mendapatkan penjelasan dan sosialisasi visi/misi. Berdasarkan observasi bahwa warga tidak mementingkan informasi yang disampaikan tetapi lebih

mementingkan dan memastikan dirinya dan keluarganya mendapatkan bantuan.

b. Identifikasi Masyarakat Penerima Bantuan

Identifikasi yang berhubungan dengan pendataan masyarakat miskin dan masyarakat kurang mampu serta layak untuk diberikan bantuan melalui program BLT. Pendataan masyarakat miskin melalui beberapa indikator dan kriteria. Seseorang dinyatakan miskin dan mendapat bantuan apabila kriteria masyarakat miskin penerima BLT yang ditentukan oleh pemerintah tersebut terpenuhi.

Selanjutnya data mengenai tanggapan masyarakat terhadap proses identifikasi masyarakat penerima bantuan serta penilaian proses implementasi terhadap identifikasi masyarakat penerima bantuan, disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.14

Tanggapan Responden Terhadap Identifikasi Masyarakat Penerima Bantuan

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	0	0,00
Cukup baik	6	20,00
Kurang baik	14	46,67
Tidak baik	7	23,33
Sangat tidak baik	3	10,00
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.14, proses identifikasi/pendataan masyarakat miskin dan kurang mampu yang terpilih atau mendapatkan program bantuan dinyatakan cukup baik oleh sebanyak 6 responden (20,00%), kurang baik sebanyak 14 responden (46,46%), tidak baik sebanyak 7 responden (23,33%), dan sangat tidak baik sebanyak 3 responden (10,00%).

Responden yang menyatakan cukup baik memberikan alasan bahwa proses identifikasi yang dilakukan petugas dengan mendatangi warga dan memberikan beberapa pertanyaan sudah sesuai dengan prosedur. Responden yang menyatakan kurang baik memberikan alasan bahwa petugas pendataan hanya memintakan persetujuan atas formulir yang sudah diisi. Responden yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak baik memberikan alasan bahwa proses identifikasi yang dilakukan oleh petugas tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena kebanyakan mereka yang mendapat bantuan adalah kerabat dekat dan masih ada hubungan saudara.

Proses implementasi program bantuan dalam melakukan identifikasi masyarakat miskin oleh petugas melalui koordinasi dengan pemerintah tingkat desa, yaitu kepala desa, kepala dusun, dan RT/RW. Pada tingkat ini diperoleh data masyarakat miskin atas

rekomendasi pimpinan desa. Langkah selanjutnya petugas melakukan verifikasi kepada warga yang sudah direkomendasikan. Pada tingkat verifikasi petugas melakukan pengecekan kriteria dan indikator kesesuaian penerima bantuan, selanjutnya akan diketahui masyarakat yang dinyatakan layak/tidak layak mendapat bantuan. Indikasi adanya penyimpangan data berada pada tingkat rekomendasi dan verifikasi.

c. Kualitas Pelaksanaan

Kualitas pelaksanaan program bantuan dinilai baik apabila dalam seluruh pelaksanaan kegiatan memuaskan banyak pihak, terutama masyarakat sebagai objek dari program bantuan. Selain itu penilaian kualitas pelaksanaan akan baik apabila telah melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak adanya penyimpangan-penyimpangan. Artinya kegiatan tersebut dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggung-jawaban.

Data mengenai tanggapan responden terhadap kualitas pelaksanaan program bantuan serta penilaian proses implementasi terhadap kualitas pelaksanaan program bantuan, disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Pelaksanaan
Bantuan Langsung Tunai

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	1	3,33
Cukup baik	10	33,33
Kurang baik	8	26,67
Tidak baik	9	30,00
Sangat tidak baik	2	6,67
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008.

Berdasarkan Tabel 4.15, kualitas pelaksanaan program bantuan secara keseluruhan dinyatakan sangat baik oleh sebanyak 1 responden (3,33%), cukup baik sebanyak 10 responden (33,33%), kurang baik sebanyak 8 responden (26,67%), tidak baik sebanyak 9 responden (30,00%), dan sangat tidak baik sebanyak 2 responden (6,67%).

Responden yang menyatakan sangat baik dan cukup baik memberikan alasan bahwa sejak dimulai dari pendataan, penyerahan kartu peserta pengambilan bantuan hingga penerimaan bantuan berjalan dengan baik walau ditemui kendala tetapi dapat diselsaikan dengan baik pula. Responden yang menyatakan sebaliknya memberikan alasan bahwa ketika pendataan terjadinya nepotisme, peserta penerima bantuan adalah mereka yang mampu secara

ekonomi dan merupakan kerabat dekat dari pimpinan desa dan petugas. Ketika penyerahan bantuan mereka mendapat fasilitas kemudahan.

Kualitas kinerja implementasi program bantuan dalam pelaksanaannya diupayakan secara prosedural dan profesional, tetapi kenyataan di lapangan terjadi penyimpangan. Petugas termasuk pimpinan desa memberikan data yang tidak akurat, dengan menyisipkan peserta di luar kriteria penerima bantuan yang mampu secara ekonomi dijadikan penerima bantuan, dan sebagian adalah keluarga dekat. Kualitas pelaksanaan hingga penyerahan bantuan diberikan sesuai dengan jadwal dan tata cara yang standar.

d. Kemampuan Petugas

Kemampuan petugas menggambarkan kemampuan dalam memberikan informasi dan administrasi serta pelayanan. Dalam penelitian ini adalah upaya petugas dalam memberikan hal-hal yang berhubungan dengan segala informasi dan administrasi yang dibutuhkan dalam implementasi program bantuan.

Data mengenai penilaian responden terhadap kemampuan petugas dalam melaksanakan program bantuan serta penilaian implementasi terhadap kemampuan petugas melaksanakan program bantuan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Petugas
Pelaksana Bantuan Langsung Tunai

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	1	3,33
Cukup baik	12	40,00
Kurang baik	8	26,67
Tidak baik	3	10,00
Sangat tidak baik	6	20,00
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.16, kemampuan petugas dalam melaksanakan program bantuan dinyatakan sangat baik oleh sebanyak 1 responden (3,33%), cukup baik sebanyak 12 responden (40,00%), kurang baik sebanyak 8 responden (26,67%), tidak baik sebanyak 3 responden (10,00%), dan sangat tidak baik sebanyak 6 responden (20,00%).

Responden yang menyatakan sangat baik dan cukup baik memberikan alasan bahwa petugas memiliki kemampuan dalam melaksanakan program bantuan, misalnya memberikan bantuan pelayanan dalam pengisian data/formulir, memberikan penjelasan, dan lainnya. Responden yang menyatakan sebaliknya memberikan alasan bahwa kurangnya keramahan pelayanan yang diberikan petugas, kurang perhatian terhadap rasa keadilan. Misalnya petugas

mengabaikan antrian penyerahan bantuan, peserta yang datang terlambat mendapat fasilitas antrian lebih awal oleh petugas.

Kemampuan petugas dalam menjalankan program bantuan sebelumnya telah mendapatkan pelatihan singkat (*briefing*), harapannya agar petugas benar-benar mempunyai kemampuan dalam menjalankan program bantuan. Informasi lapangan menghasilkan kenyataan lain, bahwa kemampuan petugas dalam pendataan dan proses serta penyerahan sudah baik, tetapi mengabaikan hal kecil yang berakibat luas. Misalnya keramahan dalam pelayanan, etika dan rasa keadilan yang terabaikan.

e. Evaluasi Kegiatan

Untuk melihat atau menilai sejauh mana efektivitas kegiatan yang telah dilakukan perlu adanya evaluasi kegiatan. Dengan dilakukannya evaluasi maka akan terlihat manfaat atau sebaliknya, kebenaran atau kesalahan, kegiatan berpengaruh positif atau negatif, dan lainnya. Apabila akan dilakukan kegiatan berikutnya akan diketahui dengan pasti tingkat urgen tidaknya sebuah kegiatan, atau penentuan langkah-langkah antisipasi agar meminimalkan kegagalan. Evaluasi biasanya dilakukan dengan observasi, kuesioner, survei terhadap objek maupun subjek sehingga diperoleh informasi yang jelas dan lengkap

Data mengenai harapan masyarakat terhadap evaluasi kegiatan program bantuan dan kinerja implementasi evaluasi kegiatan program bantuan, disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.17
Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi Kegiatan
Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	0	0,00
Cukup baik	11	36,67
Kurang baik	11	36,67
Tidak baik	8	26,67
Sangat tidak baik	0	0,00
Jumlah	30	100,01

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.17, proses evaluasi kegiatan program bantuan dinyatakan cukup baik oleh sebanyak 11 responden (36,67%), kurang baik sebanyak 11 responden (36,67%), tidak baik sebanyak 8 responden (26,67%), lainnya sangat tidak mendapat tanggapan.

Responden yang menyatakan cukup baik memberikan alasan bahwa evaluasi atas kegiatan program bantuan telah berjalan dengan baik, karena semula tidak terdaftarnya warga miskin dan tidak mampu, kemudian adanya perubahan data akibat evaluasi dari masyarakat yang akhirnya warga tidak mampu tersebut terdaftar

sebagai penerima bantuan. Selanjutnya responden yang menyatakan sebaliknya memberikan alasan bahwa bentuk evaluasi atas kegiatan program bantuan pada proses pendataan menimbulkan konflik, karena data peserta yang memperoleh bantuan telah dimanipulasi oleh petugas. Atas desakan masyarakat maka dilakukan pendataan ulang dengan pengawasan, hasilnya data dan verifikasi ke dua tersebut disetujui masyarakat.

Evaluasi atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat efektif, karena dapat mengubah daftar penerima bantuan yang semula dinyatakan tidak benar. Hasil evaluasi tersebut mengganti petugas pendata tingkat lapangan, bahkan karena merasa tidak dapat mengemban amanah warga beberapa Kepala Desa, Kepala Dusun, dan pejabat RT/RW meletakkan jabatannya atau mengundurkan diri. Dibeberapa wilayah lainnya pengunduran diri pejabat desa merupakan desakan dari penduduknya karena dianggap tidak dapat melaksanakan keadilan, etika dan moral.

2. Dampak Implementasi Bantuan Langsung Tunai

Dampak merupakan akibat dari pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang dirasakan oleh masyarakat miskin atau kurang mampu yang menerima bantuan atau dampak lingkungan atau dampak lain yang

diakibatkannya. Analisis dampak dari kegiatan program bantuan dapat menyebabkan atau menimbulkan hal-hal yang positif maupun negatif.

Dampak implementasi dalam hal ini membahas tentang perubahan sikap, motivasi, perubahan pendapatan, penyelewengan, serta pemerataan dan keadilan atas kegiatan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kegiatan.

a. Perubahan Sikap

Sikap merupakan karakteristik atau kondisi dalam diri seseorang yang akan keluar melalui tingkah laku. Acapkali sikap menggambarkan pandangan positif atau negatif seseorang terhadap sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan atas tanggapan tersebut. Perubahan sikap seseorang dapat dimotivasi oleh kejadian yang dilalui dalam hidup, melihat kejadian orang lain, nasehat, kesadaran diri atau melalui renungan terhadap sesuatu yang menjadi problem.

Tanggapan responden terhadap perubahan sikap masyarakat atas implementasi pelaksanaan program bantuan, yang disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.18
Tanggapan Responden Terhadap Perubahan Sikap Setelah
Kegiatan Bantuan Langsung Tunai

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	0	0,00
Cukup baik	12	40,00
Kurang baik	16	53,33
Tidak baik	2	6,67
Sangat tidak baik	0	0,00
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.18, perubahan sikap setelah kegiatan program bantuan dinyatakan cukup baik oleh sebanyak 12 responden (40,00%), kurang baik sebanyak 16 responden (53,33%), tidak baik sebanyak 2 responden (6,67%), lainnya tidak mendapat tanggapan.

Responden yang menyatakan cukup baik memberikan alasan bahwa perubahan sikap atas program bantuan belum kelihatan dengan jelas, tetapi mereka berharap menjadi lebih baik. Mungkin perubahan sikap yang legowo dari warga atas hasil verifikasi ke dua, semua warga terdaftar sebagai penerima bantuan, kemudian berubah menjadi tidak menerima bantuan dikarenakan masih mampu secara ekonomi dan tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan. Sikap yang merelakan bantuan tersebut dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan adalah sikap yang sangat terpuji.

Perubahan sikap yang terjadi dengan adanya implementasi program bantuan belum menunjukkan hasil. Berdasarkan informasi lapangan, program bantuan tidak mengubah sikap warga seperti apa yang diinginkan, bahkan uang yang diterima akan dihabiskan dengan kebiasaan berpesta sambil minum-minum. Sikap demikian menggambarkan kebiasaan yang kurang bagus, tetapi yang pasti adalah mengingatkan agar hidup prihatin dan menerima apa adanya dan selalu berusaha.

b. Motivasi Kerja

Motivasi kerja merupakan alat pendorong yang menyebabkan seseorang merasa terpanggil dengan senang hati untuk melakukan sesuatu kegiatan. Dari hebe apa pendapat para ahli tentang motivasi maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu pandangan tentang cara-cara atau sistem pemberian motivasi yang sampai batas-batas tertentu, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip, norma-norma yang dapat dipergunakan dalam memberikan motivasi kepada orang-orang atau kelompok tertentu

Data mengenai tanggapan responden terhadap motivasi responden dalam menafkahi keluarga dengan adanya program bantuan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.19
Tanggapan Responden Terhadap Motivasi Dalam Menafkahi Keluarga
Dengan Adanya Bantuan Langsung Tunai

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat termotivasi	8	26,67
Cukup termotivasi	13	43,33
Kurang termotivasi	8	26,67
Tidak termotivasi	1	3,33
Sangat tidak termotivasi	0	0,00
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.19, adanya program bantuan ini akan terjadi perubahan motivasi dalam menafkahi keluarga dinyatakan sangat termotivasi oleh sebanyak 8 responden (26,67%), cukup termotivasi sebanyak 13 responden (43,33%), kurang termotivasi sebanyak 8 responden (26,67%), tidak termotivasi sebanyak 1 responden (3,33%), lainnya tidak mendapat tanggapan.

Responden yang menyatakan sangat termotivasi dan termotivasi memberikan alasan bahwa termotivasi untuk mendaftarkan diri agar terpilih menjadi penerima program bantuan. Motivasi untuk memperoleh bantuan oleh warga sangat tinggi dikarenakan sumber pendapatan keluarga sangat minim. Motivasi untuk menafkahi keluarga setelah program bantuan umumnya warga kembali pada kondisi awal yaitu bekerja pada pekerjaan rutin dan

berharap agar program bantuan terus berlangsung untuk membantu rakyat miskin. Responden yang menyatakan kurang termotivasi memberikan alasan bahwa hanya mengikuti kemana arus warga yang lebih banyak bergerak. Responden yang menyatakan tidak termotivasi memberikan alasan bahwa tidak terpengaruh dengan program bantuan, apabila mendapat bantuan lebih baik, apabila tidak mendapat bantuan tidak dipermasalahkan.

Motivasi untuk memperoleh bantuan oleh warga sangat tinggi karena kondisi perekonomian warga dalam keadaan susah, pendapatan warga yang minim tidak luasa untuk dibelanjakan selain kebutuhan pokok. Program bantuan merupakan solusi untuk menambah penghasilan keluarga. Pekerjaan rutin tetap diupayakan sebagai penghasilan pokok dalam menafkahi keluarga.

c. Perubahan Pendapatan

Pendapatan masyarakat masih sangat rendah rata-rata di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp580.000. Berdasarkan survei lapangan, pendapatan masyarakat Kecamatan Siding rata-rata di bawah Rp500.000. Dengan penghasilan sebesar itu, masyarakat Kecamatan Siding masih tergolong masyarakat miskin dan layak untuk mendapat bantuan.

Data mengenai tanggapan responden terhadap perubahan pendapatan setelah program bantuan dengan adanya implementasi program bantuan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.20

Tanggapan Responden Terhadap Perubahan Pendapatan Setelah Kegiatan Bantuan Langsung Tunai

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	0	0,00
Cukup baik	8	26,67
Kurang baik	6	20,00
Tidak baik	16	53,33
Sangat tidak baik	0	0,00
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.20, program bantuan ini akan membuat perubahan pendapatan masyarakat, dinyatakan cukup baik oleh sebanyak 8 responden (26,67%), kurang baik sebanyak 6 responden (20,00%), tidak baik sebanyak 16 responden (53,33%), lainnya tidak mendapat tanggapan.

Responden yang menyatakan cukup baik memberikan alasan bahwa penghasilan mereka bertambah disebabkan karena uang hasil program bantuan dijadikan tambahan modal usaha pertanian dan peternakan. Responden yang menyatakan sebaliknya memberikan alasan bahwa penghasilan keluarga mereka tidak terjadi perubahan

sama seperti sebelumnya, bahkan dengan kenaikan harga-harga kemampuan pembelian keluarga menurun.

Perubahan pendapatan yang terjadi setelah adanya implementasi program bantuan sebagian besar tidak terjadi penambahan, akibat kenaikan harga-harga maka daya beli warga menurun. Sebagian besar warga yang mendapatkan bantuan tidak memanfaatkannya dengan baik. Uang hasil bantuan dipergunakan untuk keperluan lain, seperti digunakan untuk pesta adat, kenduri, dan lainnya.

d. Penyelewengan

Penyelewengan merupakan bentuk penyalahgunaan informasi, atau hal-hal lain yang dapat merugikan secara sepihak atau banyak pihak. Penyelewengan dapat berupa penyalahgunaan sesuatu sehingga dapat menguntungkan dirinya sendiri atau sekelompok orang di dalam lingkungannya.

Data mengenai tanggapan responden terhadap penyelewengan implementasi pelaksanaan program bantuan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.21
Tanggapan Responden Terhadap Penyelewengan
Kegiatan Bantuan Langsung Tunai

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat bersih dari penyelewengan	0	0,00
Cukup bersih dari penyelewengan	7	23,33
Kurang bersih dari penyelewengan	11	36,67
Tidak bersih dari penyelewengan	8	26,67
Sangat Tidak bersih dari penyelewengan	4	13,33
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.21, adanya penyelewengan kegiatan program bantuan dinyatakan cukup bersih dari penyelewengan oleh sebanyak 7 responden (23,33%), kurang bersih dari penyelewengan sebanyak 11 responden (36,67%), tidak bersih dari penyelewengan sebanyak 8 responden (26,67%), dan sangat tidak bersih dari penyelewengan sebanyak 4 responden (13,33%).

Responden yang menyatakan cukup bersih dari penyelewengan memberikan alasan bahwa selama proses kegiatan belum pernah mengalami dan menemukan penyelewengan dari petugas. Responden yang menyatakan sebaliknya memberikan alasan bahwa pendataan awal yang dilakukan petugas dengan

mendatakan/memasukkan kerabat dekat atau keluarganya yang mampu secara ekonomi sebagai penerima bantuan. Temuan lain yang disampaikan oleh warga adalah adanya petugas yang dengan sengaja meminta uang pelayanan atas pekerjaan yang dilakukan.

Penyelewengan yang terjadi dengan adanya implementasi program bantuan menemukan adanya penggelembungan data peserta keluarga miskin, yang akhirnya menyebabkan kisruh. Penyelewengan lainnya adalah adanya oknum petugas yang dengan sengaja memintakan uang jasa atas pelayanan yang diberikan kepada peserta penerima bantuan.

e. Pemerataan dan Keadilan

Pemerataan dan keadilan merupakan langkah awal dari pelaksanaan kegiatan. Pemerataan dan keadilan dalam hal ini berupa penyebaran penyaluran program bantuan tidak hanya terpusat pada satu titik atau kelompok saja tetapi tersebar dan dapat menjangkau beberapa tempat dalam lokasi. Selain itu pernyataan pemerataan dan keadilan dapat berupa besaran bantuan yang disalurkan sama untuk semua orang dan tidak dibedakan oleh sesuatu unsur tertentu di luar ketentuan yang berlaku.

Data mengenai tanggapan responden terhadap pemerataan dan keadilan atas pelaksanaan program bantuan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.22
Tanggapan Responden Terhadap Pemerataan dan Keadilan
Penerimaan Bantuan Langsung Tunai

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	0	0,00
Cukup baik	7	23,33
Kurang baik	12	40,00
Tidak baik	7	23,33
Sangat tidak baik	4	13,33
Jumlah	30	99,99

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.22, adanya program bantuan ini akan terjadi pemerataan dan keadilan bagi masyarakat yang menerima bantuan, dinyatakan cukup baik oleh sebanyak 7 responden (23,33, kurang baik sebanyak 12 responden (40,00%), tidak baik sebanyak 7 responden (23,33%), dan sangat tidak baik sebanyak 4 responden (13,33%).

Responden yang menyatakan cukup baik memberikan alasan bahwa pendataan dan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara adil karena yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat miskin yang memang layak untuk diberikan bantuan. Responden yang

menyatakan sebaliknya memberikan alasan bahwa pemerataan dan keadilan yang dilakukan petugas dalam menentukan masyarakat penerima bantuan masih menyisakan kolusi dan nepotisme, karena masih ada masyarakat yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan yang dimaksud

Pemerataan dan keadilan yang terjadi dengan adanya implementasi program bantuan mendapat penilaian yang kurang baik dari warga. Beberapa temuan yang mengarah kepada ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum petugas. Seperti yang telah disebutkan semula bahwa petugas telah memberikan fasilitas kepada beberapa warga yang tidak layak untuk menerima bantuan.

3. Kendala Implementasi Bantuan Langsung Tunai

Kendala merupakan faktor-faktor yang menghambat jalannya proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di lapangan. Faktor penghambat dapat berupa kendala internal yang berasal dari kondisi masyarakat penerima bantuan, petugas pelaksana maupun administrasi, Kendala eksternal dapat berupa kondisi lingkungan, faktor alam, dan lainnya. Kendala merupakan akibat dari pelaksanaan kegiatan yang tidak direncanakan secara matang. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa upaya pemecahan kendala-kendala sebelumnya. Kendala yang timbul saat ini dapat berupa kegagalan pelaksanaan kegiatan atau permasalahan yang

timbul dikarenakan faktor-faktor tertentu yang tidak dapat dikontrol atau di luar perkiraan.

Kendala implementasi dalam hal ini membahas tentang dukungan masyarakat terhadap program bantuan, kendala sarana transportasi, tingkat pendidikan masyarakat, dan kendala lingkungan internal maupun eksternal yang menghambat implementasi program Bantuan Langsung Tunai. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kegiatan.

a. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat merupakan bentuk persetujuan dari masyarakat yang berada pada lingkungan pelaksanaan kegiatan. Dukungan merupakan langkah awal dari suksesnya sebuah kegiatan. Dukungan akan diberikan oleh masyarakat apabila program yang ditawarkan membawa pengaruh positif bagi semua orang terutama bagi masyarakat yang berada di dalam lingkungan pelaksanaan kegiatan. Untuk memperoleh dukungan diperlukan sosialisasi yang baik agar tidak terjadi salah pengertian.

Data mengenai tanggapan responden apakah dukungan masyarakat menjadi kendala dalam implemensi program bantuan, disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.23

Tanggapan Responden Terhadap Dukungan Masyarakat Atas Bantuan Langsung Tunai

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat tidak menjadi kendala	13	43,33
Tidak menjadi kendala	13	43,33
Kurang menjadi kendala	4	13,33
Cukup menjadi kendala	0	0,00
Sangat menjadi kendala	0	0,00
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.23, adanya program bantuan ini akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat terutama bagi yang menerima bantuan, dinyatakan sangat tidak menjadi kendala oleh sebanyak 13 responden (43,33%), tidak menjadi kendala sebanyak 13 responden (43,33%), kurang menjadi kendala sebanyak 4 responden (13,33%), dan lainnya tidak mendapat tanggapan.

Responden menyatakan bahwa masyarakat sangat mengharapkan implementasi program bantuan ini berkelanjutan, serta bantuan tersebut tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi untuk semua warga masyarakat di domisili mereka. Terjadinya kecemburuan sosial dari kalangan masyarakat khususnya yang tidak mendapat bantuan.

Kendala implementasi program bantuan dari masyarakat ternyata mendapat penilaian yang positif, artinya masyarakat mendukung sepenuhnya program bantuan walaupun masih ada sedikit masyarakat menjawab tidak mengetahui bentuk dukungan yang seharusnya dilakukan dan diperlukan dalam implementasi program bantuan.

b. Sarana Transportasi

Transportasi merupakan jalur penghubung antara satu tempat dengan tempat lainnya, yang dapat berupa sarana jalan, sungai, kendaraan dan lainnya. Fasilitas transportasi di domisili kegiatan berupa jalan yang dibangun masyarakat secara swadaya serta kendaraan roda dua yang hanya dapat digunakan sebagai jalur transportasi lalu lintas untuk semua aktivitas.

Data mengenai tanggapan responden mengenai kendala sarana transportasi terhadap implementasi pelaksanaan program bantuan, disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.24

Tanggapan Responden Terhadap Sarana Transportasi dan Hubungannya Dengan Bantuan Langsung Tunai

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat tidak menjadi kendala	1	3,33
Tidak menjadi kendala	11	36,67
Kurang menjadi kendala	3	10,00
Cukup menjadi kendala	12	40,00
Sangat menjadi kendala	3	10,00
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.24, kendala sarana transportasi dalam mendukung pelaksanaan program bantuan, dinyatakan sangat tidak menjadi kendala oleh sebanyak 1 responden (3,33%), tidak menjadi kendala sebanyak 11 responden (36,67%), kurang menjadi kendala sebanyak 3 responden (10,00%), cukup menjadi kendala sebanyak 12 responden (40,00%), dan sangat menjadi kendala sebanyak 3 responden (10,00%).

Responden yang menyatakan sangat tidak menjadi kendala atau tidak menjadi kendala memberikan alasan bahwa program bantuan dapat direncanakan penjadwalannya, jika kondisi jalan rusak di waktu musim hujan maka dilaksanakan pada waktu musim tidak hujan. Responden yang menyatakan sebaliknya memberikan alasan bahwa jalur transportasi yang ada di wilayah mereka sebagian

besar menggunakan jalan tanah, sehingga hanya akan lancar pada musim kemarau. Pada musim penghujan jalanan akan menjadi becek sehingga sarana transportasi terganggu

Dukungan transportasi yang ada terhadap implementasi program bantuan mendapat penilaian yang kurang baik, karena kondisi jalan utama sebagai satu-satunya jalur transportasi sebagian masih merupakan jalan tanah yang rusak ketika musim penghujan, sebagian lagi jalan aspal yang sudah mulai rusak dan berlubang.

c. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang berpengaruh pada wawasan dan pola pikir. Adanya perbedaan tingkat pendidikan membuat perbedaan di dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin kritis dan selektif di dalam memutuskan untuk memilih

Data mengenai tanggapan responden mengenai tingkat pendidikan masyarakat terhadap kendala implementasi pelaksanaan program bantuan, disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.25

Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pendidikan dan Hubungannya Dengan Bantuan Langsung Tunai

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat tidak menjadi kendala	0	0,00
Tidak menjadi kendala	3	10,00
Kurang menjadi kendala	19	63,33
Cukup menjadi kendala	6	20,00
Sangat menjadi kendala	2	6,67
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.25, tingkat pendidikan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan program bantuan, dinyatakan tidak menjadi kendala oleh sebanyak 3 responden (10,00%), kurang menjadi kendala sebanyak 19 responden (63,33%), cukup menjadi kendala sebanyak 6 responden (20,00%), dan sangat menjadi kendala sebanyak 2 responden (6,67%).

Responden yang menyatakan kurang menjadi kendala memberikan alasan bahwa tingkat pendidikan warga yang rendah dapat di atasi dengan memberikan sosialisasi secara berkelanjutan dan sosialisasi yang sering dilakukan. Responden yang menyatakan sebaliknya memberikan alasan bahwa pendidikan yang rendah yang mereka miliki membuat mereka lambat untuk menangkap informasi

yang ada, lambat dalam membaca, dan perbedaan bahasa membuat mereka tidak mengerti bahkan menimbulkan salah pengertian.

Kendala tingkat pendidikan masyarakat terhadap implementasi program bantuan mendapat penilaian yang kurang baik, artinya tingkat pendidikan masyarakat menjadi kendala dalam implementasi program bantuan. Pemberian penjelasan kepada warga sudah sering dilakukan tetapi mereka tidak mengerti dengan penjelasan tersebut.

d. Lingkungan Internal/eksternal

Lingkungan internal/eksternal merupakan kondisi disekitar kegiatan program bantuan yang berpengaruh atau mendukung baik dalam bentuk material maupun nonmaterial. Lingkungan internal lebih mengarah pada kondisi terdekat dengan kegiatan baik berpengaruh secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan eksternal merupakan kondisi yang lebih luas berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada kegiatan.

Data mengenai tanggapan responden mengenai kendala lingkungan internal/eksternal dan kondisi lingkungan tersebut terhadap implementasi pelaksanaan program bantuan, disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.26

Tanggapan Responden Terhadap Kendala Lingkungan Internal/eksternal
Hubungannya Dengan Bantuan Langsung Tunai

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat tidak menjadi kendala	3	10,00
Tidak menjadi kendala	17	56,67
Kurang menjadi kendala	10	33,33
Cukup menjadi kendala	0	0,00
Sangat menjadi kendala	0	0,00
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.26, kendala lingkungan internal/eksternal dalam mendukung pelaksanaan program bantuan, dinyatakan sangat tidak menjadi kendala oleh sebanyak 3 responden (10,00%), tidak menjadi kendala sebanyak 17 responden (56,67%), kurang menjadi kendala sebanyak 10 responden (33,33%), dan lainnya tidak mendapat tanggapan.

Responden yang menyatakan sangat tidak menjadi kendala atau tidak menjadi kendala memberikan alasan bahwa lingkungan internal diyakini sangat mendukung program, karena kondisi ekonomi masyarakat membutuhkannya, sementara itu lingkungan eksternal seperti kondisi desa-desa yang dekat/berbatasan mempunyai kondisi yang sama dan menerima bantuan BLT, sehingga menjadi contoh untuk menerima bantuan tersebut.

Responden yang menyatakan kurang menjadi kendala memberikan alasan program bantuan BLT adalah program yang membantu masyarakat miskin sehingga mereka sangat menantikannya.

Dukungan lingkungan internal/eksternal yang ada terhadap implementasi program bantuan mendapat penilaian yang baik, masyarakat mengerti bahwa program BLT adalah bantuan untuk warga miskin, sehingga kehadirannya sangat dinantikan.

4. Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat atau keterlibatan anggota masyarakat, lembaga organisasi, dan lainnya dalam mendukung kegiatan Bantuan Langsung Tunai.

Partisipasi masyarakat dalam hal ini membahas tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan, keterlibatan masyarakat dalam evaluasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap implementasi program Bantuan Langsung Tunai. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kegiatan.

a. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan

Perencanaan merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan yang dijadikan tolok ukur kegiatan serta sebagai langkah pelaksanaan berikutnya yang disusun secara sistematis, dapat diukur

pencapaiannya serta mudah dievaluasi. Penyusunan rencana kegiatan sangat memperhatikan aspek-aspek lingkungan dimana tempat akan dilaksanakan kegiatan dan hasil yang akan dicapai. Agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik perlu dukungan semua pihak sehingga perlu disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan batasan-batasan tertentu. Artinya tidak semua orang harus tahu secara mendetail tetapi hanya pada bagian-bagian yang sifatnya umum dan layak untuk diketahui.

Data mengenai tanggapan responden terhadap perencanaan program bantuan dan partisipasi masyarakat atas perencanaan implementasi program bantuan, disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.27

**Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Perencanaan
Implementasi Bantuan Langsung Tunai**

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat partisipasi	1	3,33
Cukup partisipasi	5	16,67
Kurang partisipasi	10	33,33
Tidak partisipasi	12	40,00
Sangat tidak partisipasi	2	6,67
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.27, dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan sehingga berpartisipasi langsung dalam

pelaksanaan program bantuan, dinyatakan sangat berpartisipasi oleh sebanyak 1 responden (3,33%), cukup partisipasi sebanyak 5 responden (16,67%), kurang partisipasi sebanyak 10 responden (33,33%), tidak partisipasi sebanyak 12 responden (40,00%), dan sangat tidak partisipasi sebanyak 2 responden (6,67%).

Responden yang menyatakan sangat berpartisipasi dan cukup berpartisipasi memberikan alasan bahwa ikut mensukseskan program bantuan dengan memberikan keterangan seluas-luasnya kepada petugas. Responden yang menyatakan sebaliknya memberikan alasan bahwa mereka tidak dilibatkan secara langsung tetapi berada pada posisi penerima bantuan. Walaupun pada kenyataan timbul protes yang sangat keras sehubungan dengan kesalahan pendataan dari petugas. Kenyataan lain adalah adanya sekelompok masyarakat yang berusaha memperoleh dengan memaksakan kehendak, padahal mereka masih cukup mampu dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Partisipasi masyarakat terhadap implementasi program bantuan sangat mendukung, namun kondisi tersebut disalah artikan oleh petugas sehingga sewenang-wenang menggelembungkan data, menyalahgunakan wewenang. Partisipasi masyarakat muncul menjadi berlebihan karena masyarakat merasa diperlakukan tidak adil oleh petugas.

b. Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari perencanaan. Kegiatan yang dilakukan sebaiknya sesuai dengan jadwal yang dibuat sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan yang baik apabila melibatkan masyarakat di lingkungan domisili kegiatan. Keterlibatan masyarakat merupakan proses edukasi, sosialisasi, pemberdayaan, serta konfirmasi sehubungan dengan kegiatan

Data mengenai tanggapan responden terhadap proses pelaksanaan program bantuan dan partisipasi masyarakat atas proses implementasi program bantuan, disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.28

Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Proses Implementasi Bantuan Langsung Tunai

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat partisipasi	1	3,33
Cukup partisipasi	9	30,00
Kurang partisipasi	9	30,00
Tidak partisipasi	8	26,67
Sangat tidak partisipasi	3	10,00
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.28, dilibatkannya masyarakat dalam proses pelaksanaan sehingga berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan program bantuan, dinyatakan sangat berpartisipasi oleh

sebanyak 1 responden (3,33%), cukup partisipasi sebanyak 9 responden (30,00%), kurang partisipasi sebanyak 9 responden (30,00%), tidak partisipasi sebanyak 8 responden (26,67%), dan sangat tidak partisipasi sebanyak 3 responden (10,00%).

Responden yang menyatakan sangat berpartisipasi dan cukup berpartisipasi memberikan alasan bahwa membantu mensukseskan program bantuan dengan memberikan keterangan yang benar, memberikan persetujuan ketika pendataan, mengamankan ketika terjadi kisruh, dan lainnya. Responden yang menyatakan sebaliknya memberikan alasan bahwa ikut mendemonstrasi petugas termasuk mendemonstrasi pemimpin desa agar melakukan pendataan ulang karena telah terjadi penyimpangan data peserta oleh petugas.

Keterlibatan masyarakat dalam implementasi program bantuan sudah sangat berpartisipasi dengan memberikan bantuan dan kemudahan pendataan dan mengamankan kekisruhan. Provokasi kekisruhan datangnya dari kelompok masyarakat yang tidak mendapat bantuan.

c. Keterlibatan Masyarakat Dalam Evaluasi Kegiatan

Untuk melihat atau menilai sejauh mana efektivitas kegiatan yang telah dilakukan perlu adanya evaluasi kegiatan. Dengan dilakukannya evaluasi maka akan terlihat manfaat atau sebaliknya, pemborosan atau penghematan, kegiatan berpengaruh positif atau negatif, dan lainnya. Penentu kebijakan akan dapat melakukan kegiatan berikutnya apabila diketahui dengan pasti tingkat urgensi kegiatan, penghematan, dan langkah-langkah antisipasi agar dapat meminimalkan kegagalan. Evaluasi biasanya dilakukan dengan observasi, kuesioner, survei terhadap objek maupun subjek sehingga diperoleh informasi yang jelas dan lengkap

Data mengenai tanggapan responden terhadap evaluasi pelaksanaan program bantuan dan partisipasi masyarakat atas evaluasi implementasi program bantuan, disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.29

**Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Evaluasi
Implementasi Bantuan Langsung Tunai**

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat partisipasi	0	0,00
Cukup partisipasi	5	16,67
Kurang partisipasi	12	40,00
Tidak partisipasi	13	43,33
Sanga tidak partisipasi	0	0,00
Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan Tabel 4.29, masyarakat terlibat dalam evaluasi dan berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan program bantuan, dinyatakan cukup partisipasi oleh sebanyak 5 responden (16,67%), kurang partisipasi sebanyak 12 responden (40,00%), tidak partisipasi sebanyak 13 responden (43,33%), dan lainnya tidak mendapat tanggapan.

Responden yang menyatakan cukup berpartisipasi memberikan alasan bahwa ikut memberikan pendapat dan masukan kepada petugas dan pimpinan desa dalam menentukan warga desa yang layak mendapat bantuan, tetapi tidak ikut memutuskan peserta yang berhak mendapatkan bantuan. Responden yang menyatakan sebaliknya memberikan alasan bahwa kegiatan evaluasi wewenangnya berada pada ketua kelompok, sedangkan untuk peserta hanya memberikan saran dan pendapat.

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi implementasi program bantuan sudah baik, karena berhasil melakukan perubahan data dengan memberikan dukungan untuk bekerja dengan baik dan benar, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan. Bentuk kerjasama yang baik karena merasa pelaksanaan dilakukan dengan tidak benar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan persepsi masyarakat miskin terhadap efektivitas dan dampak implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Siding, adalah kurangnya sosialisasi tentang visi/misi serta tujuan program BLT yang sesungguhnya telah disampaikan oleh petugas tetapi terabaikan oleh kepentingan warga yang menuntut dirinya beserta keluarganya harus menerima program BLT; kurangnya proses identifikasi terhadap masyarakat penerima bantuan disebabkan karena petugas melakukan kolusi dan nepotisme dengan mendata keluarganya dan kerabatnya sebagai penerima BLT; kurangnya kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada warga, hal ini bersifat situasional yang digeneralisir oleh warga yang kurang puas.
2. Faktor motivasi dan kondisi lingkungan sebagai pendukung dalam implementasi program BLT. Sementara kendala implementasi adalah terjadi kesalahan persepsi masyarakat hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dalam menyerap sosialisasi informasi, bahkan masih ada masyarakat tdk bisa membaca.
3. Dampak implementasi program BLT secara signifikan tidak mempengaruhi perubahan sikap masyarakat dan tidak mempengaruhi pendapatan masyarakat. Dengan demikian tujuan program BLT di Kecamatan Siding Kabupaten

Bengkayang relatif tidak tercapai dan tidak efektif dilaksanakan.

B. Saran

1. Sosialisasi kepada masyarakat sebaiknya dilakukan dengan intensif, sampai mereka benar-benar memahami program yang akan dilakukan, dan peran partisipasi masyarakat perlu dijalin agar kondisi lapangan dapat diakomodir dengan baik.
2. Kesalahan persepsi oleh masyarakat terhadap perbedaan informasi perlu dievaluasi, apalagi untuk kegiatan yang cakupannya nasional dan berskala besar seperti Pendataan Sosial Ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak (keluarga miskin), BPS diharapkan dapat merencanakan secara matang, terutama rentang waktu sosialisasi yang cukup dan terukur sebelum kegiatan dilaksanakan agar pada pelaksanaan sudah tidak muncul permasalahan.
3. Program BLT ini perlu dikaji kembali secara komprehensif karena banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat bawah (*grassroots*). Sebaiknya model padat karya yang disesuaikan dengan kondisi lapangan merupakan bantuan pada masyarakat miskin yang memihak pada rakyat. Masyarakat miskin memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Bantuan yang diberikan diharapkan benar-benar efektif dan dapat memperbaiki ekonomi masyarakat miskin.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. (2004), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (YKPN).
- Badan Pusat Statistik. (2004), *Profil Kemiskinan Bengkulu*, BPS Kabupaten Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik. (2005), *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2004*, Buku-2 Kabupaten, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2005), *Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05), Pedoman Pelaksanaan Lapangan KSK/PKSK dan PCL*, Jakarta-Indonesia.
- Badan Pusat Statistik dan Asian Development Bank. (2005), *"Laporan Hasil Studi Pengembangan Sistem Pemantauan Indikator Dinamis Terkait Kemiskinan"*, Jakarta.
- Basri, Faisal. (2002), *Perekonomian Indonesia – Tantangan dan Harapan*, Jakarta: Erlangga.
- Hill, Hal. (2001), *Ekonomi Indonesia*, Edisi Kedua, Penterjemah Tribowo Budi Santoso dan Hadi Susilo, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Ife, Jim, (1995), *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*, Australia: Longman.
- Istianda, Meita (2005), *Pancuan Studi Mandiri*, Universitas Terbuka
- Kertonegoro, Sentanoe. (2000), *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI).
- Kuncoro, Mudrajad. (2004), *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Marzuki. (1996), *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Penerbit BPFE-UII.
- Moleong, Lexy J. (2000), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT, Remaja Rosdakarya.
- Nasution. M.N (2001), *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Parker, David dan Joseph. (2000), *The Economy*, Yogyakarta: Andi and Pearson Education Asia Pte. Ltd.

- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez, (1994), *The Integration of Social Work Practice*. California: Wadsworth, Inc.
- Peta Kemiskinan Kabupaten Bengkayang Tahun 2005.
- Profil Kemiskinan Kabupaten Bengkayang. (2004), "*Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman*", Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Rachbini, Didik. (2004). *Pembangunan Ekonomi Rakyat Di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.
- Rappaport, J., (1984), *Studies in Empowerment: Introduction to the Issue, Prevention In Human Issue*, USA.
- Sugiyono. (2003), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- (2001), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (1995), *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Cet 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- (2001), *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- (2003), *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Edisi 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Suryabrata, Sumadi. (2004), *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Swift, C., & G. Levin, (1987), *Empowerment: An Emerging Mental Health Technology*, Journal of Primary Prevention, USA.
- Tambunan, Tulus. (2001), *Perekonomian Indonesia ; Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: Penerbit Cialia Indonesia.
- Todaro, Michael. (2000), *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga
- Umar, Husein. (2003), *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Abdul. (1997), *Analisa Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. (2005), "*Good Governance . Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*", Jakarta: Penerbit Insan Cendekia.
- Yustika, Ahmad Erani. (2005), *Perekonomian Indonesia ; Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan*, Malang: Banyumedia.

-----, (2007), *Perekonomian Indonesia, Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*, Malang : BPFE Unibraw.

Sumber Internet :

Hadi, Astar. (2008), "*Membaca Michael Howlett Menuju Implementasi Kebijakan Sosial Posmodern*", diunduh 17 Februari 2008, dari situs World Wide Web: <http://www.astarhadi.blogspot.com>

Jumlah penduduk miskin. (2008), "*penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan*", diunduh : 10 Pebruari 2008, Dari Situs World Wide Web: <http://www.ypr.or.id/download/s1.pdf>

Kompensasi BBM. (2008), "*Penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) diperlukan data mikro rumah tangga miskin yang memuat informasi ..*", diunduh 17 Februari 2008, dari situs World Wide Web: <http://www.bps.go.id>

Yudhoyono, Susilo Bambang. (2008), "*Presiden Republik Indonesia*", diunduh 17 Februari 2008, dari situs World Wide Web: <http://www.presidentri.go.id>

UNIVERSITAS TERBUKA



KUESIONER

Dalam rangka penelitian tentang Analisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus : Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang), mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan jawaban pertanyaan berikut dengan jujur dan apa adanya.

Jawaban yang diberikan tidak berpengaruh apapun terhadap saudara, karena semata-mata hanya untuk keperluan penelitian dan kami menjamin kerahasiaan saudara.

Terima kasih atas kesediaan saudara untuk mengisi kuesioner ini.

PROFIL RESPONDEN

Usia :tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Pendidikan terakhir : Tidak. Sekolah/ SD/ SD / SLTP /
Pekerjaan : Tani / Buruh /
Status Perkawinan : Sudah menikah / Belum menikah / Janda / Duda
Tanggungan Keluarga :Orang
Penghasilan : Rp..... per-bulan.

PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia, dimana menurut Bapak/Ibu adalah PALING TEPAT dari masing-masing pernyataan.

BUTIR-BUTIR PERTANYAAN

Proses Implementasi

1. Proses sosialisasi visi/misi dan tujuan program bantuan kepada masyarakat
 - a. Sangat jelas
 - b. Cukup jelas
 - c. Kurang jelas
 - d. Tidak jelas
 - e. Sangat tidak jelas
2. Proses identifikasi penerima bantuan terhadap masyarakat miskin
 - a. Sangat baik
 - b. Cukup baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik

3. Kualitas pelaksanaan program bantuan
 - a. Sangat baik
 - b. Cukup baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
4. Kemampuan petugas dalam melaksanakan kegiatan implementasi program bantuan
 - a. Sangat baik
 - b. Cukup baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
5. Proses evaluasi kegiatan program bantuan
 - a. Sangat baik
 - b. Cukup baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik

Dampak Implementasi

6. Perubahan sikap setelah kegiatan program bantuan
 - a. Sangat baik
 - b. Cukup baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
7. Motivasi masyarakat dalam menapkahi keluarganya setelah program bantuan
 - a. Sangat termotivasi
 - b. Cukup termotivasi
 - c. Kurang termotivasi
 - d. Tidak termotivasi
 - e. Sangat tidak termotivasi
8. Perubahan pendapatan setelah program bantuan
 - a. Sangat baik
 - b. Cukup baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik

9. Penyelewengan implementasi program bantuan
 - a. Sangat bersih dari penyelewengan
 - b. Cukup bersih dari penyelewengan
 - c. Kurang bersih dari penyelewengan
 - d. Tidak bersih dari penyelewengan
 - e. Sangat tidak bersih dari penyelewengan
10. Pemerataan dan keadilan atas pelaksanaan
 - a. Sangat baik
 - b. Cukup baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik

Kendala Program Bantuan

11. Dukungan masyarakat menjadi kendala dalam implementasi program bantuan
 - a. Sangat tidak menjadi kendala
 - b. Tidak menjadi kendala
 - c. Kurang menjadi kendala
 - d. Cukup menjadi kendala
 - e. Sangat menjadi kendala
12. Sarana transportasi menjadi kendala dalam implementasi program bantuan
 - a. Sangat tidak menjadi kendala
 - b. Tidak menjadi kendala
 - c. Kurang menjadi kendala
 - d. Cukup menjadi kendala
 - e. Sangat menjadi kendala
13. Tingkat pendidikan masyarakat menjadi kendala dalam implementasi program bantuan
 - a. Sangat tidak menjadi kendala
 - b. Tidak menjadi kendala
 - c. Kurang menjadi kendala
 - d. Cukup menjadi kendala
 - e. Sangat menjadi kendala
14. Lingkungan internal/eksternal menjadi kendala dalam implementasi program bantuan
 - a. Sangat tidak menjadi kendala
 - b. Tidak menjadi kendala
 - c. Kurang menjadi kendala
 - d. Cukup menjadi kendala
 - e. Sangat menjadi kendala

Partisipasi Masyarakat

15. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program bantuan
 - a. Sangat partisipasi
 - b. Cukup partisipasi
 - c. Kurang partisipasi
 - d. Tidak partisipasi
 - e. Sangat tidak partisipasi

16. Keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan program
 - a. Sangat partisipasi
 - b. Cukup partisipasi
 - c. Kurang partisipasi
 - d. Tidak partisipasi
 - e. Sangat tidak partisipasi

17. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kegiatan
 - a. Sangat partisipasi
 - b. Cukup partisipasi
 - c. Kurang partisipasi
 - d. Tidak partisipasi
 - e. Sangat tidak partisipasi

18. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan
 - a. Sangat partisipasi
 - b. Cukup partisipasi
 - c. Kurang partisipasi
 - d. Tidak partisipasi
 - e. Sangat tidak partisipasi

UNIVERSITAS TERBUKA

PROFIL RESPONDEN

NO RESP	PEKERJAAN	KELAMIN	UMUR	STATUS KAWIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	TANGGUNGAN	PENGHASILAN
1	PETANI	L	48	K	TS	2	Rp 150,000
2	PETANI	P	58	J	TTSD	4	Rp 275,000
3	PETANI	P	57	J	TTSD	3	Rp 225,000
4	BURUH	L	56	K	TTSD	4	Rp 200,000
5	PETANI	P	52	J	TSD	5	Rp 185,000
6	PETANI	L	50	K	TS	3	Rp 300,000
7	BURUH	L	45	K	TSD	5	Rp 220,000
8	PETANI	L	59	K	TTSD	6	Rp 175,000
9	BURUH	L	56	K	TTSD	3	Rp 275,000
10	BURUH	P	63	J	TTSD	6	Rp 220,000
11	PETANI	P	48	K	TSD	4	Rp 300,000
12	PETANI	L	57	D	TS	3	Rp 200,000
13	PETANI	L	62	K	TS	4	Rp 300,000
14	BURUH	L	54	D	TSD	4	Rp 220,000
15	PETANI	L	47	K	TSD	5	Rp 275,000
16	PETANI	L	57	D	TSD	6	Rp 275,000
17	PETANI	L	55	D	TSD	3	Rp 225,000
18	PETANI	L	48	K	TS	5	Rp 250,000
19	BURUH	L	56	D	TTSD	5	Rp 200,000
20	PETANI	L	60	K	TTSD	7	Rp 225,000
21	BURUH	L	54	K	TSD	4	Rp 220,000
22	BURUH	L	61	K	TS	7	Rp 200,000
23	PETANI	L	55	K	TTSD	6	Rp 300,000
24	PETANI	P	45	J	TTSD	5	Rp 200,000
25	PETANI	P	54	J	TS	5	Rp 275,000
26	BURUH	L	64	K	TTSD	7	Rp 300,000
27	BURUH	L	58	K	TTSD	4	Rp 220,000
28	BURUH	L	49	K	TSD	5	Rp 190,000
29	PETANI	L	63	K	TTSD	6	Rp 280,000
30	BURUH	P	58	J	TSD	6	Rp 200,000

Keterangan :L=Laki-laki
P=PerempuanK=Kawin
J=JandaD=Duda
TS=Tidak SekolahTTSD=Tidak Tamat SD
TSD=Tamat SD

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

NO RESP.	Proses Implementasi					Dampak Implementasi					Kendala Implementasi					Partisipasi		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	CB	CB	CB	CB	CB	CB	SB	CB	CB	CB	SB	CB	CB	TB	TB	TB	CB	
2	TB	TB	CB	CB	CB	CB	CB	TB	KB	KB	KB	CB	KB	TB	TB	TB	CB	
3	KB	TB	CB	CB	CB	CB	CB	CB	CB	CB	SB	CB	KB	TB	TB	TB	CB	
4	CB	CB	SB	SB	CB	CB	CB	CB	CB	CB	SB	CB	CB	CB	CB	TB	CB	
5	CB	KB	KB	ST	KB	KB	KB	TB	KB	KB	KB	CB	CB	TB	CB	CB	TB	
6	CB	TB	CB	CB	CB	CB	SB	TB	ST	KB	KB	TB	CB	TB	TB	TB	CB	
7	ST	ST	TB	ST	TB	CB	CB	CB	CB	CB	SB	CB	TB	TB	TB	KB	CB	
8	KB	KB	KB	TB	KB	KB	KB	TB	KB	KB	KB	KB	KB	CB	TB	KB	KB	
9	ST	ST	TB	ST	TB	KB	CB	CB	ST	KB	CB	CB	CB	TB	TB	KB	KB	
10	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	CB	KB	KB	CB	KB	KB	ST	ST	CB	CB	
11	CB	TB	CB	CB	CB	CB	CB	CB	KB	SB	CB	CB	CB	KB	KB	KB	KB	
12	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	TB	KB	CB	TB	KB	KB	ST	KB	KB	KB	
13	CB	TB	CB	CB	CB	TB	CB	TB	CB	CB	TB	KB	CB	KB	ST	KB	TB	
14	TB	CB	CB	CB	CB	CB	CB	CB	ST	CB	CB	CB	KB	KB	CB	CB	TB	
15	TB	TB	TB	KB	KB	CB	SB	CB	TB	CB	CB	CB	SB	KB	SB	CB	TB	
16	KB	KB	KB	KB	KB	KB	CB	TB	KB	CB	CB	TB	CB	CB	CB	CB	TB	
17	ST	ST	TB	TB	TB	KB	CB	CB	KB	CB	CB	TB	CB	CB	KB	TB	TB	
18	CB	CB	CB	CB	CB	CB	SB	TB	KB	CB	TB	KB	CB	KB	KB	TB	CB	
19	CB	KB	KB	KB	KB	KB	CB	TB	KB	CB	TB	CB	CB	CB	CB	TB	CB	
20	KB	KB	TB	ST	TB	KB	KB	TB	KB	CB	TB	CB	CB	KB	KB	TB	TB	
21	CB	KB	KB	KB	KB	KB	CB	TB	TB	TB	CB	CB	CB	TB	ST	TB	TB	
22	KB	KB	TB	TB	TB	KB	SB	TB	KB	CB	TB	KB	CB	TB	KB	TB	TB	
23	TB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	TB	KB	CB	KB	KB	KB	TB	CB	TB	KB	
24	TB	CB	CB	CB	CB	CB	CB	TB	TB	SB	CB	TB	KB	TB	CB	TB	KB	
25	TB	CB	CB	CB	CB	CB	SB	TB	ST	CB	CB	CB	CB	TB	CB	TB	KB	
26	CB	KB	ST	ST	KB	KB	KB	TB	CB	SB	CB	ST	CB	TB	CB	TB	KB	
27	TB	KB	TB	CB	TB	CB	SB	TB	KB	CB	TB	TB	CB	KB	CB	TB	KB	
28	CB	KB	TB	CB	TB	CB	TB	TB	ST	SB	CB	ST	KB	KB	KB	TB	KB	
29	KB	TB	TB	KB	KB	KB	TB	KB	CB	SB	TB	TB	SB	KB	KB	TB	TB	
30	KB	KB	ST	KB	KB	KB	KB	TB	ST	CB	ST	KB	CB	TB	CB	TB	KB	

Keterangan :

SB=Sangat Baik ; CB=Cukup Baik ; KB=Kurang Baik ; TB=Tidak Baik ; ST=Sangat Tidak Baik

DATA NOMINAL

NO RESP.	Proses Implementasi			Dampak Implementasi			Kendala Implementasi			Partisipasi								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	2	2	4	4
2	2	2	4	4	4	4	4	2	3	3	3	4	3	3	2	2	3	2
3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	4	2	2	3	2
4	4	4	5	5	4	4	4	1	4	5	5	4	4	4	4	2	3	3
5	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	2	4	4	2
6	4	2	4	4	4	4	5	2	3	3	3	2	3	4	2	2	2	4
7	1	1	2	1	2	4	4	4	4	3	5	4	2	3	2	2	3	3
8	3	3	3	2	5	3	3	2	3	5	5	3	3	4	2	2	3	3
9	1	1	2	1	2	3	4	1	3	3	3	4	2	4	2	2	4	4
10	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	1	1	3	3
11	4	2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	3	3	3	3
12	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3
13	4	2	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	3	4	3	1	3	2
14	2	4	4	4	4	4	5	4	1	4	4	4	3	3	3	4	3	2
15	2	2	2	1	2	4	4	4	2	4	4	2	4	5	5	5	4	2
16	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	5	2	3	4	4	4	4	2
17	1	1	2	2	2	3	4	2	4	3	4	4	2	4	4	3	2	2
18	4	4	4	4	4	4	5	2	3	4	5	4	2	4	4	3	2	3
19	4	3	3	3	3	3	4	2	2	4	4	4	3	3	3	3	2	4
20	3	3	2	1	2	3	3	3	3	4	5	4	3	4	3	3	2	2
21	4	3	3	3	3	3	4	2	2	4	4	4	1	4	2	1	2	2
22	3	3	2	2	2	3	5	2	3	4	4	2	3	3	3	3	2	2
23	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	5	3	3	3	3	4	3	3
24	2	4	4	4	4	3	4	2	2	4	4	2	3	3	2	4	4	3
25	2	4	4	4	4	4	5	2	1	4	4	1	1	4	2	3	2	3
26	4	3	1	1	3	3	3	3	4	5	4	2	2	4	3	4	3	2
27	2	3	2	4	2	4	5	2	2	4	4	1	3	3	3	3	2	3
28	4	3	2	4	2	4	4	2	1	5	5	2	2	5	3	3	2	2
29	3	2	2	3	3	3	2	3	4	5	5	2	3	4	3	4	2	2
30	3	3	1	3	3	3	3	2	1	4	4	1	3	4	2	4	2	3
Jumlah	88	83	89	89	93	100	118	82	81	82	129	85	83	113	81	87	82	80

Reliabilitas dan Validitas

- Proses Implementasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.815	.942	6

Inter-Item Correlation Matrix

	X11	X12	X13	X14	X15	X1
X11	1.000	.494	.671	.551	.663	.787
X12	.494	1.000	.539	.459	.471	.633
X13	.671	.539	1.000	.943	.961	.961
X14	.551	.459	.943	1.000	.928	.914
X15	.663	.471	.961	.928	1.000	.938
X1	.787	.633	.961	.914	.938	1.000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

- Dampak Implementasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of items
.697	.716	6

Inter-Item Correlation Matrix

	X21	X22	X23	X24	X25	X2
X21	1.000	.591	.556	-.084	.214	.689
X22	.591	1.000	.477	-.152	-.237	.496
X23	.556	.477	1.000	.015	.102	.731
X24	-.084	-.152	.015	1.000	.134	.485
X25	.214	-.237	.102	.134	1.000	.414
X2	.689	.496	.731	.485	.414	1.000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

- Kendala Implementasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.719	.726	5

Inter-Item Correlation Matrix

	X31	X32	X33	X34	X3
X31	1.000	.278	.269	.177	.737
X32	.278	1.000	-.171	-.086	.562
X33	.269	-.171	1.000	.569	.550
X34	.177	-.086	.569	1.000	.572
X3	.737	.562	.550	.572	1.000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

- Partisipasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.668	.602	5

Inter-Item Correlation Matrix

	X41	X42	X43	X44	X4
X41	1.000	.410	.158	-.279	.730
X42	.410	1.000	.408	-.377	.762
X43	.158	.408	1.000	-.066	.573
X44	-.279	-.377	-.066	1.000	.000
X4	.730	.762	.573	.000	1.000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.